

**TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP SEKTOR RIIL
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

ARUMASYHA
NIM. 1202120161

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARI'AH
1438 H /2016 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP
SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **ARUMASYHA**

NIM : **1202120161**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**

PROGRAM STUDI : **EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S-1)**

Palangka Raya, 18 Agustus 2016

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. JIRHANURDDIN, M.Ag
NIP. 19591009 198903 1 002

ENRIKO TEDJA SUKMANA, M.SI
NIP. 19840321 201101 1 012

Menyetujui :

Dekan

Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dra. Hj. RAHMANIAR, MSI
NIP. 19540630 198103 2 001

JELITA, MSI
NIP. 19830124 20091 2 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari ARUMAYSHA

Palangka Raya, September 2016

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : ARUMAYSHA

NIM : 120 212 0161

Judul : **TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP SEKTOR
RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. JIRHANURDDIN, M.Ag
NIP. 19591009 198903 1 002

ENRIKO TEDJA SUKMANA, M.SI
NIP. 19840321 201101 1 012

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA oleh ARUMAYSHA NIM 1202120161 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Agustus 2016

Palangka Raya, 18 Agustus 2016

Tim Penguji :

1. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi** (.....)
Pimpinan Sidang/Penguji
2. **Dr. Ibnu Elmi. A.S. Pelu, SH, MH** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **Enriko Tedja Sukmana, M.Si** (.....)
Sekretariat sidang/Penguji

Dekan,
Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. RAHMANIAR,MSI
NIP. 19540630 198103 2 001

TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TERHADAP SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh : ARUMAYSHA

Pembimbing 1. Dr. H. JIRHANURDDIN, M.Ag
2. ENRIKO TEDJA SUKMANA, M.SI

ABSTRAKSI

Sektor riil dibidang Usaha Kecil dan Menengah memiliki keunggulan tersendiri dalam sektor tersier seperti bidang usaha yang memanfaatkan kansumber daya alam, untuk menghidupkan sektor riil dimaksud perlukan sumber daya manusia yang berperan sangat penting dalam pembangunan. Terkait dengan judul di atas maka penelitian ini difokuskan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memberi kontribusi positif perekonomian di Indonesia serta merupakan salah satu jalan bagi rakyat yang ingin lebih produktif dengan membuka usahanya, sedangkan Pemerintah harus mendukung kegiatan tersebut. Sebab melalui pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini telah terbukti memberikan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat untuk berkembang menjadi penggerak ekonomi. Peneiti melihat bahwa Usaha Kecil Menengah ini sangatlah penting sebab mereka tidak hanya sebagai kelompok yang bergerak dalam mencari sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai menyediakan lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung telah membantu pengurangan angka pengangguran dan membantu masyarakat yang berketerampilan rendah. Dengan demikian pemerintah daerah sudah seharusnya memberi perhatian kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu bagian dari aset daerah. Fokus penelitian ini dirumuskan tentang Bagaimana tingkat pendapatan Usaha Kecil Menengah terhadap sektor riil dikota Palangka Raya?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas tentang data tingkatan pendapatan UKM terhadap sektor riil di kota Palangka Raya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan usaha kecil dan menengah Usaha Kecil Menengah terhadap sektor riil dikota Palangka Raya, bahwa Jenis usaha dan hasil per-hari sebagai berikut SN ; usaha Ikan presto (per-hari Rp. 300.000,-), KSJR; Toko Obat (per-hari Rp. 200.000,-), NAS ; usaha Jamur Tiram Putih (per-hari Rp. 250.000,-), HC ; usaha Fotocopy (per-hari Rp. 400.000,-), TS; Usaha Kerupuk kentang (per-hari Rp. 2.400.000,-), SJO; usaha Jasa Bangunan (per-hari Rp. 400.000,-), HGS ; usaha Batu Akik (per-hari, tidak menentu), IRM ; usaha bengkel motor (per-hari Rp. 400.000,-). Modal usaha sendiri yang di putarguling UKM di Kota Palangka Raya sebagai berikut : SN Rp. 15.000.000,-, KSJR Rp 75.000.000,-, NAS Rp. 15.000.000,-, HC Rp. 40.000.000,-, TS Rp. 40.000.000,-, SJO Rp. 45.000.000,-, HGS Rp. 10.000.000,-, AMH Rp. 40.000.000,-, ATN Rp.20.000.000,- dan IRM Rp. 15.000.000,-. Dilihat dari fakta usaha, hasil yang di dapat dan modal usaha yang dimiliki oleh UKM yang di teliti di Kota Palangka Raya, pada dasarnya tingkat pendapatan usaha mereka terhadap sektor riil belum memenuhi kriteria, karena di bawah standar asset dan omzet yang di tetapkan oleh oleh perindag. Usaha mikro maks- Asset 50 juta dan omzet 300 juta, usaha kecil maks- Asset > 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet > 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, usaha menengah asset > 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Kata Kunci :UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Sektor Riil

THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SME) INCOME LEVEL OF REAL SECTOR IN PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

The real sector of small and medium enterprise had superiority in tertiary sector such as the business sectors that utilize natural resources. The resurrection of real sector in natural resources required human resources who had a very important role in the economic growth. Related to the title above, this research focused on micro, small and medium enterprises those had provided the positive contribution in Indonesia economy. It is one of occasion for society who wants to be more productive by opening the business. While the government should support the activity because through the growth of micro, small and medium enterprises had been proven to provide some opportunities and employment for society who develop into the economic drivers. The researcher observed the small and medium enterprises that are important sources. It occurred because they are not only as community who earned the cost of life but also provided employment directly and indirectly. It aided to decrease the number of unemployment and aided the society who has low skill capability. Thus the government should pay attention to small and medium enterprise (SME) as one part of the region's assets. The research instrument is how are the small and medium enterprise income level of the real sectors in Palangka Raya city?

This research is field research, one of qualitative research techniques. It describes the level income of small and medium enterprises explicitly concerning on the real sectors in Palangka Raya city.

The result of this research indicated that the level income of small and medium enterprise concerning on the real sectors in Palangka Raya city. That various enterprises and the income per day. As followed SN; Presto fish (per day IDR 300K), KSJR; Pharmacy (per day IDR 200K), NAS; White Oyster Mushroom (per day IDR 250K), Photocopy service (per day IDR 400K), TS; Potato crackers (per day IDR 2400K), SJO; Building Material (per day IDR 400K), HGS; Akik stone (per day uncertain), IRM; Motorcycle service (per day IDR 400K). The capital which is managed by small and medium enterprises in Palangka Raya as followed: SN IDR 15.000K, KSJR IDR 75.000K,-, NAS IDR 15.000K,-, HC IDR 40.000K, ,TS IDR 40.000K,-, SJO IDR 45.000K,-, HGS IDR 10.000K,-, AMH IDR 40.000K,-, ATN IDR 20.000K,- dan IRM IDR 15.000k,-. Viewed from the real business, the results obtained and the capital owned by SMEs that researched in Palangka Raya city. Basically the level of their income on the real sector has not fulfilled the criteria, because of substandard assets and turnover is set by the Trade and Industry. Micro-businesses Asset maximal- 50 million and a turnover of 300 million, small businesses maximal- Asset > 50 million to 500 million and a turnover of > 300 million to 2.5 billion, medium business asset > 500 million to 10 billion and a turnover of 2,5 billion to 50 billion.

Key words: SME (Small and Medium Enterprises), Real sector

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E), pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH., MH. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Drs. Fahmi, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Ibu Dra. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Ibu Jelita,MSI, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Bapak Dr. H. JIRHANURDDIN, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak ENRIKO TEDJA SUKMANA,M.SI, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan

waktu dan banyak memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Yth. Segenap dosen pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terima kasih yang tiada terhingga atas ilmu dan pemikiran yang telah diberikan.
7. Yth. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan memberikan izin disaat penulis mengadakan penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta motivasi kepada penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis pribadi. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Palangka Raya, November 2016

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**TINGKAT PENDEPATAN UKM TERHADAP SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016

Yang Membuat Pernyataan,

ARUMASYHA
NIM. 1202120161

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta semoga segala perbuatan amal baik yang ananda lakukan mendapat pahala dan ridho dari Allah SWT.

Suamiku tercinta dan anak-anak tersayang yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan dan semangat berjuang untuk mencapai cita-cita.

Orang tua serta seluruh kelurgaku yang senantiasa menunggu keberhasilanku. Serta tak lupa pula sahabat serta rekan-rekanku, terima kasih atas kebersamaannya

MOTO



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء:
29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Qs. An-Nisa‘:29)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematis Penelitian	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Deskripsi Teoritis	12
1.1 Pengerian Tingkat Pendahuluan	12
1.2 Usaha Mikro	12
1.3 Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Al-quran	28
1.4 Sektor Riil	29
1.5 Teori Penetapan Harga Dalam Hukum Islam	47
1.6 Teori Mekanisme Pasar Islami	47
C. Kerangka Berfikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
C. Objek dan Subjek Penelitian	54

	D. Teknik Pengumpulan Data	55
	E. Metode Triangulasi Data	57
	F. Metode Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG TINGKAT PENDAPATAN UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH) TERHADAP SEKTOR RIIL DI KOTA PALANGKA RAYA	
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	60
	B. Pemaparan Data	72
	C. Analisis Hasil Penelitian	88
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	116
	B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
WNI	: Warga Negara Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
DIPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di kota Palangka Raya dari tahun ketahun semakin meningkat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota. Khususnya pembangunan ekonomi usaha kecil produktif yang dilakukan orang-perorangan dalam rangka penyerapan kekurangan lapangan kerja oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Usaha kecil terbukti dapat bertahan terhadap krisis ekonomi moneter tahun 1997 sampai saat ini. Khusus sektor riil antara lain UKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perternakan dan perikanan) dan sektor pertambangan dan penggalian. Penciptaan nilai tambah UKM di masing-masing sektor tersebut selalu meningkat terutama sektoran dalam UKM yakni sector pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan usaha kecil tahun 2013-2014 menurut badan pusat statistik di kota Palangka Raya perkembangan usaha kecil.

Faktor yang begitu kuat untuk menghidupkan sektor riil adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia berperan sangat penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Di dalam sektor riil ada dua sektor yang berperan penting yaitu pertanian dan sektor usaha mikro, kecil,

dan menengah. Karena sektor pertanian memegang peranan sangat penting dalam pertumbuhan. Dan hal tersebut dibuktikan pada tahun 2009 bahwa sektor pertanian menempati peringkat dua terbesar dalam perekonomian dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 858,3 trilyun atau 15,3 persen.

Dan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) juga dapat memberi kontribusi positif perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu jalan bagi rakyat yang ingin lebih produktif dengan membuka usaha. Pemerintah pun mendukung kegiatan UMKM dengan dikeluarkannya program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dengan bertambah mudahnya akses kredit perbankan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program KUR, maka akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor riil, melalui pertumbuhan di UMKM. Dan UKM menunjang sektor riil yaitu. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat dan keberadaan UKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain UKM juga menghadapi banyak masalah yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikan pendapatan dengan ciri-ciri merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi

yang masih relative sederhana, kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pengaruh nya UKM dengan pendapatan daerah adalah sangat mempengaruhi karena peranan UMKM sangat penting karena sektor tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung dengan tingkat pengangguran dan keterampilan yang rendah. Oleh karena pemerintah daerah sudah seharusnya memberi perhatian karena UKM adalah aset daerah. Jadi apabila UKMnya tidak bisa berkembang didaerah tersebut maka tingkat pendapatannya akan menurun karena tingkat pengangguran di daerah tersebut sangat tinggi maka tingkat pendapatan akan menurun.

Mengapa usaha kecil tidak terpengaruh dengan krisis moneter karena mempergunakan modal sendiri dan tenaga kerja sendiri. Usaha kecil ini perlu perhatian pemerintah khusus pemerintah kota Palangka Raya yaitu dengan pembinaan dan pelatihan kewiraswastaan agar dapat tumbuh dan berkembang. Peranan UKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sangat penting. Faktanya terdapat ketidak seimbangan antara sumbangan UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibandingkan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan.

Usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas sebuah lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada

masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilita nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya. Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor terbesar dalam perekonomian dunia. Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.¹

Dan hal tersebut juga menghambat kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi hubungannya dengan sector riIl juga ada karena kalau tingkat pendapatan masyarakat menurun maka akan berpengaruh juga dengan sektor riil. Karena ukm di kota Palangka Raya ini masih banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi apa bila tingkat pendapatan masyarakat menurun akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran dan apabila tingkat pendapatan masyarakat berkembang dengan baik maka negara kita akan maju dan berkembang. Sektor riil adalah lingkungan suatu usaha yang nyata yang menghasilkan barang atau jasa.

Jadi dengan adanya sektor riil sangat berpengaruh kepada tingkat pendapatan UKM karena sektor riil adalah sektor yang berfungsi memproduksi, mengeksplorasi, dan menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Dilihat dari tingkat produksi negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tetapi bila hal itu bukan merupakan reflexi pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa) maka uang yang melimpah itu tidak ada

¹Wikipedia ensiklopedia bebas, kemiskinan,www.sigana.com.id/index.php/kemiskinan-absolut.diakses 15 maret 2016.

nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas actor produksi lainnya². Dan faktanya yang saya lihat dari kota palangka raya dengan adanya kegiatan ekonomi atau UKM sektor riil bisa berjalan dan berkembang. Jumlah UKM yang berada di Kota Palangka Raya berdasarkan wawancara dengan Kabid Disperindag berjumlah ± 14.000, itu menunjukkan ekonomi UKM berkembang di Palangka Raya. Maka berdasarkan itu peneliti mengangkat judul “**Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Terhadap Sektor Riil Di Kota Palangka Raya**”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pendapatan usaha kecil dan menengah UKM terhadap sektor riil di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat pendapatan UKM terhadap sektor riil di kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan

²AdiwarmanA.karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2007,h.122.

- b. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari'ahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini tentang rencana atau rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun bagian didalamnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian,

metode pengumpulan data, serta metode triangulasi data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas profit, objek penelitian, hasil analisis data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

BAB VI: Penutup

Pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ulla ramadini melakukan penelitian dengan judul “*peranan bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil dikota Palangka Raya*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bank muamalat berperan dalam hal memberikan pinjaman modal usaha. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal bagi usahanya dan memperluas jaringan usaha. Dengan adanya peran tersebut khususnya dengan adanya pinjaman dana dari bank muamalat kepada para pelaku usaha maka dengan adanya peran tersebut maka usaha yang dijalankan mengalami perkembangan baik dari keuntungan yang didapat maupun dengan bertambahnya jaringan usaha.³

Helwiyani maulida melakukan penelitian dengan judul “*peranan kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan tengah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah*”. Kantor Perwakilan wilayah BI Prov Kal-Teng dalam mengembangkan UMKM berperan penting dapat memberikan bantuan teknis dalam rangka mendukung

³Ulla ramadini melakukan penelitian dengan judul “*peranan bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil dikota palangkaraya*”. Skripsi Jurusan Syariah IAIN Palangkaraya.

pengembangan UMKM. Bantuan teknis yang dimaksud meliputi:(a) penelitian (b)pelatihan (c)penyediaan informasi (d) fasilitasi.⁴

Lisa noviyani wati melakukan penelitian dengan berjudul “Peranan Baitul Maal Wal Tanwil Kube sejahteraan Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro”. Hasil penelitian tersebut dimana BMT kube sejahtera mempunyai keunggulan yaitu sangat berperan dalam memberikan suatu pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut dapat membantu usaha mikro yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang di berikan BMT kube sejahtera mempunyai keunggulan yaitu prosedur dan persyaratan yang mudah dalam hal pengajuan pembiayaan.⁵

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Ulla ramadini, “ <i>peranan bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil dikota Palangka Raya</i> ”	Mengkaji tentang Usaha kecil dan menengah (ukm)	Penelitian yang dilakukan oleh ulla ramadini adalah jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini dilaksanakan di bank muamalat Indonesia cabang Palangka Raya.

⁴Helwiyani maulida melakukan penelitian dengan judul “*peranan kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan tengah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah*”. Skripsi jurusan syariah IAIN Palangkaraya

⁵Lisa noviyana wati, peranan baitul maal wal tamwil kube sejahtera terhadap pembiayaan modal usaha dalam membantu usaha mikro .Skripsi jurusan syariah IAIN Palangkaraya.

		<p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu bank muamalat berperan dalam hal memberikan pinjaman modal usaha. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal bagi usahanya dan memperluas jaringan usaha. Dengan adanya peran tersebut khususnya dengan adanya pinjaman dana dari bank muamalat kepada para pelaku usaha maka dengan adanya peran tersebut maka usaha yang dijalankan mengalami perkembangan baik dari keuntungan yang didapat maupun dengan bertambahnya jaringan usaha.</p>
<p>Helwiyanimaulida “<i>peranan kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan tengah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah</i>”</p>	<p>Mengkaji tentang usaha kecil dan menengah (ukm)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh helwi maulida adalah jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilaksanakan di kantor perwakilan wilayah bank Indonesia provinsi Kalimantan tengah dan bank muamalat Indonesia cabang Palangka Raya. Hasil penelitian ini Kantor Perwakilan wilayah BI ProvKal-Teng dalam mengembangkan UMKM berperan penting dapat memberikan bantuan teknis dalam</p>

		<p>rangka mendukung pengembangan UMKM.</p> <p>Bantuan teknis yang dimaksud meliputi:</p> <p>(a) penelitian (b) pelatihan (c) penyediaan informasi (d) fasilitasi</p>
<p>Lisa noviyana wati melakukan penelitian dengan berjudul <i>“Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro “</i></p>	<p>Mengkaji tentang Usaha kecil Dan menengah (ukm)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan lisa noviyana wati jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilaksanakan baitul maal tamwil kube sejahtera Palangka Raya hasil penelitian tersebut dimana BMT kube sejahtera mempunyai keunggulan yaitu sangat berperan dalam memberikan suatu pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut dapat membantu usaha mikro yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang di berikan BMT kube sejahtera mempunyai keunggulan yaitu prosedur dan persyaratan yang mudah dalam hal pengajuan pembiayaan.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti.

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Tingkat Pendapatan

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia tingkat adalah lapis dari sesuatu yang bersusun atau berlinggek-linggek atau derajat.⁶

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya), pencarian.⁷ Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha

Menurut peneliti pengertian dari tingkat pendapatan adalah derajat hasil kerja atau hasil pencarian atau hasil jerih payah masyarakat untuk sebuah usaha yang masih berjalan dan layak untuk didirikan dan dipertahankan. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah merugi.

2. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan

⁶Indrawan ws, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, jombang.2013.

⁷*Ibid.*,

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁸

Menurut Departemen Perindustrian (1993) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dari Rp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro, dengan memiliki kekayaan bersih (aset per tahun paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan(omset per tahun) paling banyak Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).⁹

Usaha mikro adalah usaha milik sendiri yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan memiliki aset pendapatan sebesar Rp50.000.000, dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000. contoh usaha mikro antara lain adalah dagang

⁸Usaha mikro, <https://www.google.com/search?q=gogle&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&channel=fflb#channel=fflb&q=pengertian+umkm>, di akses 15 maret 2016.

⁹ Tim Kerja Moneter, *Skim Kredit Bank Indonesia:Bank Indonesia:2012,h.2.*

(warung kelontong,warung nasi,mie bakso, sayuran, dan jamu), industri kecil seperti konveksi,pembuatan tempe,kerupuk,kecap,dan sablon. Jasa seperti tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit. Pengrajin seperti sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman, dan pertanian atau peternakan seperti palawija, ayam buras, itik, dan lele. Dan usaha mikro ini bertujuan agar taraf hidup rumah tangga mempelajari serta menanamkan tata laksana ekonomi yang sehat dan baik.Dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin.Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga.Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta.Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

b. Ciri-ciri Usaha Mikro

1. Jenis barang usahanya tidak tetap dapat berganti pada tertentu
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap dapat berubah sewaktu-waktu

3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha: sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah
5. Pada umumnya belum akses ke perbankan namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.¹⁰
6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk akses ke lembaga keuangan non bank.¹¹

Ciri-ciri usaha kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
- b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
- c. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.

¹⁰Usaha mikro, <https://www.gogle.com/search?q=gogle&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enGB:official&client=fireloxa&channel=ffib#channel=ffib&q=pengertian+umkm>, diakses 15 maret 2016.

¹¹Usaha mikro, <https://www.google.com/search?q=gogle&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&channel=ffib#channel=ffib&q=pengertian+umkm>, di akses 15 maret 2016.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.¹²

c. Kriteria UMKM

Adapun kriteria UMKM seperti tabel di bawah ini :

Table 2.2

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Milia

Berdasarkan table diatas usaha yang memasuki kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

¹² Sadono sukino, *makro ekonomi*, jakartra.2013.h.9.

tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan yang termasuk kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan yang termasuk kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹³

d. Peran usaha kecil dan menengah

Usaha kecil mempunyai peran penting dan strategi bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik Negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia,

¹³Wikipedia, umkm, <https://www.google.com/pentingnya-peran-umkm-dalam-pembangunan.html#klasifikasi-umkm.html>, di akses 15 maret 2016.

usaha kecil merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan usaha kecil dan menengah diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami usaha kecil, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh usaha kecil di Indonesia cukup baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya keamanan. Adapun peran usaha kecil tersebut ialah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan arus urbanisasi serta motor penggerak bagi pembangunan nasional dan daerah.¹⁴

Ada beberapa ciri spesifik mengenai usaha kecil, pertama, struktur sangat sederhana; kedua sedikit aktivitas yang diformalkan; ketiga, teknologinya sederhana; keempat, manajemennya lentur; kelima, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana serta aman elaborasi.¹⁵

Peran usaha kecil dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang tersebar, (3) pemain penting dalam pengembangan

¹⁴ Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

¹⁵ Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,(4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis dalam semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonmi belum optimal.¹⁶

Usaha kecil juga memanfaatkan sumber daya alam (SDM) yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha kecil dapat membantu mengolah SDA yang ada di setiap daerah maka hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Fungsi keberadaan usaha kecil yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja dimana mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Apalagi orang-orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal ini menjadi lebih menarik untuk menjadikan usaha sendiri karena mereka merasa bebas dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha yang kecil terlebih dahulu.¹⁷

Maka dari itu peran usaha kecil sangatlah strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi faktor pembangunan ekonomi pada masa yang akan mendatang.

¹⁶ Usaha mikro, <http://salria-sig.blogspot.com/2011/05/latar-belakang-ukm-usaha-kecil-menengah.html>. diakses 27 maret 2016.

¹⁷ Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

Dibukanya lapangan pekerjaan baik itu dengan berwirausaha maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

e. Hakikat UMKM

Sesuai dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁸

Meskipun banyak sudut pandang tentang hakikat atau kriteria usaha mikro (kecil), namun secara substantif sudut pandang tersebut memiliki kesamaan. UU.No.9 Tahun 1995 melihat usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Kriteria dimaksud, di antaranya: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

¹⁸Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009, h.32.

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) milik warga Negara Indonesia; (3) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau beralifiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (4)berjumlah ilmuwan lain juga melontarkan kritikaan seperti Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881) dan Kenneth Boulding.¹⁹

f. Kondisi UKM Di Indonesia

Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluas angkatan kerja dan menyediakan fleksibilitas serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Keberadaan UMKM Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM peting untuk dikembangkan dan di pertahankan. UMKM di Negara Indonesia ini sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya

¹⁹*Ibid.*,h.32.

tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha di sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu departemen perindustrian dan perdagangan, serta departemen koperasi dan UMKM. Dan perkembangan UMKM di harapkan dapat memberikan upaya –upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Adapun Peran dan fungsi usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat :

1. Penyerapan tenaga kerja

Usaha kecil memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data menunjukkan lebih dari 66 juta orang atau sekitar 99,45% dari jumlah kesempatan kerja di

Indonesia bekerja di sektor usaha ekonomi (Menegkop & UKM ,2000 DAN IHSAN,2003).

2. Pemerataan pendapat

Jumlah usaha kecil di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapat.

3. Nilai tambah bagi produk daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam Kalimantan tengah ini dikelola oleh pengusaha kecil sebagai profesional, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produksi itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah ini.

4. Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha kecil, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi

menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.²⁰

Maraknya kajian ilmu tentang ilmu ekonomi islam ini tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, ekonomi, dan politik yang muncul akibat kelemahan yang inheren dalam ilmu dalam ilmu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dianggap gagal memainkan peran dan fungsi utamanya, mengabaikan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan ekonomi. Kemunculan ekonomi dan lembaga keuangan islam di sinyalir muncul sebagai refleksi kegagalan yang dialami ideologi-ideologi besar dalam mewujudkan janji-janjinya.

Istilah rekonstruksi pendekatan atau disiplin ilmu ekonomi islam disini digunakan untuk memberikan satu keyakinan bahwa ekonomi islam bukanlah suatu disiplin ilmu baru. Karya-karya intelektual muslim klasik telah banyak mengupas berbagai aspek yang menjadi subject matter ekonomi modern sejak abad VIII hingga XI M (1047M) seperti karya-karya Risalat al-shahabah'abd allah ibn al-muqaffa (109-147H/727-762M) yang mengupas kebijakan dan administrasi keuangan Negara, kitab al-Kharaj, Karya Abu Yusuf (113-182H/731-789M) yang membahas tentang

²⁰*Ibid.*,h.32.

kebijakan fiscal, kitab al-Amwal Abu'Ubaid al-Qasim ibn Sallam (157-224H/774-838M) yang membalas kebijakan keuangan negara.

Bahkan sederet nama seperti Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1283-1328), dan Ibn Khaldun (1332-1404) memiliki andil dan sumbangan pemikiran yang tidak kecil bagi perkembangan ilmu ekonomi islam (karim,2001). Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama. Berbeda dari itu, ekonomi konvensional, sebuah istilah yang digunakan untuk mengacu pada ilmu ekonomi yang di dasarkan pada paradigma sekularisme, fragmentasi, dan kebebasan-ilaian pengetahuan yang kini banyak dikritisi karena kelemahan-kelemahannya yang semakin menganga. Karena kelemahan internal itu sehingga ekonomi konvensional mendapat banyak kritikan, salah satunya yang telah dikemukakan di atas bentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sejalan dengan UU.No 5.Tahun 1995 tersebut, Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merumuskan usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,-(dua ratus juta) dan atau mempunyai omzet (nilai produksi) atau hasil penjualan rata-rata per tahun

sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,-(satu miliar) dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Meskipun usaha kecil (UK) memainkan peran penting sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, namun tidak berarti usaha kecil ini berjalan datar tanpa hambatan apa-apa. Ketidakberdayaan dari berbagai sudut sering kali membuat usaha kecil die out. Karena itu, upaya pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis menjadi satu langkah kongkrit menjadikan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.²¹

g. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berpijak diatas kakinya sendiri (mndiri). Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan (Depdikbud),1982), memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan (to give power or authority to dan to give ability to or enable (oxford dictionary)

²¹ *Ibid.*,h.32.

Upaya kearah pemberdayaan usaha kecil sesungguhnya mengandung stigma dimana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidakberdayaan. Pada sisi lain, pemberdayaan usaha kecil mengisaratkan fakta adanya dikotomi antara dua kekuatan yang semestinya berdampingan secara sinergik,yaitu usaha kecil sebagai representasi dari ekonomi rakyat (wong cilik) versus ekonomi kuat (konglomerat).

Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang berdiri dari sejumlah usaha kecil,dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya masih sedang terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional,padat karya,dan output produksinya diperuntukkan kepada rakyat.

Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya (Iacia,1999 dan poeroe,1996).

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki nya sesuai dengan amanat konstitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan

potensi(ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihanya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.²²

Dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan keadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan juga meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan pengatasan kemiskinan.

3. Ekonomi Mikro Dalam perspektif Al-quran

Munculnya term ekonomi mikro merupakan representasi dari dualisme sistem sosial ekonomi di Indonesia. Ekonomi konglomerat menjadi simbol dari para pengusaha berdasi yang memiliki saku tebal yang disukai pemerintah, namun lemah dan goyah serta rapuh, tidak mampu bertahan dalam terpaan badai krisis ekonomi sehingga seketika itu pula ambruk dan hutang-hutangnya menjadi beban yang harus dibayar dari jerih payah rakyat banyak melalui bantuan negara pada sisi lain, dan ekonomi rakyat menyimbolkan sekelompok ekonomi

²² *Ibid.*,h.32.

lemah yang tidak pernah merasakan sejuknya air conditioning (AC) di dalam gedung-gedung megah.

Ekonomi mikro adalah simbol pedagang pinggiran yang menjajakan kebutuhan banyak orang dipinggiran jalan, namun mampu berdiri kokoh di tengah hempasan badai yang menerjang bahkan mampu memberikan kontribusi riil bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional.²³

4. SEKTOR RIIL

a. Definisi Sektor riil

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia sektor adalah lingkungan suatu usaha;temberang tajam atau bagian bulatan yang berbatas dua baris lurus yang ditarik dari keliling ketitik pusat bulatan.²⁴ Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia riil adalah nyata atau sungguh.²⁵

Menurut peneliti pengertian dari sektor riil adalah lingkungan suatu usaha yang nyata dan sungguh. Atau sektor usaha kecil yang ada di masyarakat terutama rakyat kecil, contohnya di bidang pertanian, peternakan, dan kelautan.

Menurut Direktorat keuangan Negara-BAPENAS , sektor riil adalah segala bentuk kegiatan perekonomian yang terkait dengan permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agrerat (aggregate supply). Dengan kata lain sektor riil adalah sektor yang

²³ *Ibid.*,

²⁴ Tim media, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, 2009.

²⁵ Indrawan ws, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, jombang.2013.

berfungsi memproduksi, mengeksplorasi, dan menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil ini disebut juga dengan istilah sektor industri.²⁶

Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor riil itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan output. Outputnya biasanya berupa barang dan jasa. Perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, itu semua termasuk sektor riil. Karena mereka secara langsung memproduksi dan memperkerjakan SDM dan membayar upah.

b. Keseimbangan Sektor dan Riil

Keseimbangan sektor riil merupakan suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran pada pasar barang. Keseimbangan dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada dalam keadaan keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) seimbang baik di pasar uang maupun pasar barang.

²⁶<http://liliesmiati2122.blogspot.co.id/2015/09/makalah-sektor-moneter-penopang-sektor.html>, diakses 15 maret 2016.

Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil ini disebut juga dengan istilah pasar barang. Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri.²⁷

c. Kebijakan Sektor Riil

sektor riil/real itu pengertiannya adalah sektor usaha kecil yang ada di masyarakat terutama rakyat kecil. Contoh : pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional.

Sektor non-riil adalah sektor lainnya seperti: listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa.²⁸

Sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Contoh barang yaitu baju, kain dan lain-lain. Contoh jasa adalah jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan, jasa perawatan, jasa konsultasi bisnis, jasa pelatihan, jasa rekrutmen karyawan, jasa penjualan, hingga jasa keamanan. Pada awalnya sektor riil berupa

²⁷ Thohamhammad.blogspot.co.id/2014/08/keseimbangan-sektor-riil-dan-moneter.html, diakses 15 maret 2016.

²⁸ Adi barahma, Sektor riil, http://perekonomianindonesia.blogspot.co.id/2015/04/v-behaviorurldefaultvml0_8.html, diakses 16 maret 2016.

barang mendominasi perekonomian, tetapi akhir akhir ini sektor riil jasa yang memenuhi perekonomian. Produksi barang cenderung merosot. Tentu saja, dengan menggunakan pabrik yang besar, produksinya pun bisa massal, harga jualnya bisa membuat industri-industri rakyat kecil gulungtikar. Sektor riil yang strategis di negeri ini yaitu pertanian semakin rendah. Namun, pelan tapi pasti, sistem padat modal itu. Pertanian di Indonesia banyak dilakukan secara tradisional. Untuk produksi beras kita pernah maju pada tahun 1988. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sampai saat ini negara agraris ini masih tetap sebagai pengimpor beras. Di samping jumlahnya yang besar, harga beras impor juga lebih murah. Sehingga beras impor bisa mematikan petani-petani tradisional kita.

d. Fenomena Ekonomi Sektor Riil

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 melanda negeri kita, perekonomian makin menurun baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemicunya adalah sektor nonriil atau moneter. Permasalahan di sektor ini menyebabkan pula timbulnya permasalahan sektor riil. Harga-harga barang dan jasa naik bukan karena hukum permintaan dan penawaran (supply and demand), namun karena suku bunga perbankan naik dan uang banyak beredar dipasar uang, pasar modal, bursa saham, valuta asing dibandingkan di pasar barang dan jasa (masyarakat).

Dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar di Indonesia seharusnya adalah pergerakan ekonomi sektor riil berupa pertanian, perikanan/kelautan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata dan usaha sektor jasa dan sebagainya) bukan pergerakan ekonomi sektor nonriil berupa pasar uang, pasar modal, bursa saham, investasi asing, utang luar negeri, perbankan dan sebagainya.

Faktor utama penyebab belum Bergeraknya sektor riil yakni pemerintah belum mempunyai visi dan misi mengarahkan kebijakan ekonomi dengan memberdayakan pengelolaan sumber daya alam dibidang :pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perdagangan, perindustrian dan infastruktur lainnya. Adapun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Pemerintah memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen pada tiga triwulan terakhir 2007, pemerintah dan DPR menargetkan pertumbuhan 6,3 persen pada tahun ini dan 6,6-6,9 persen pada tahun 2008 tapi itu adalah inpres semata namun sepenuhnya tidak membumi.²⁹

²⁹Sektor riil, menggerakkan perekonomian,
http://makassarpreneur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi, diakses 17 maret.

Sebagai bukti konkrit adalah terdapat tujuh sektor riil mengalami penurunan produksi contohnya: pertambangan dan penggalian yang turun menjadi 2 % dari 5,6% pada triwulan I. Kemudian sektor listrik, gas, air bersih 5,9% dari 8,2%, konstruksi 8% dari 9,3%, perdagangan, hotel dan restoran 6% dari 8,5% keuangan, real estat dan jasa perusahaan 6,8% dari 7,1% dan jasa-jasa 6,6% dari 7%. Bidang tenaga kerja sangat serendah Bappenas menghitung, tahun 2006 penyerapan/permintaan tenaga kerja setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya 42.000 orang. Padahal, pada tahun 2001 mencapai 253.000 dan tahun 2003 sebesar 248.000 orang.

Krisis kawasan yang meledak di pertengahan 1997 seharusnya mengajarkan pada pencetus kebijakan, bahwa tanpa ditopang sektor riil yang kokoh, suatu negara akan sangat rentan terhadap guncangan dari luar. Contohnya, Indonesia yang paling rapuh sektor riilnya dan terbukti paling lama pulih dari krisis Lebih menyedihkan, indikator makro yang bagus tersebut juga tak menyentuh sama sekali kehidupan puluhan juta penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun praktis tak mengalami perbaikan hidup.

Sektor finansial Pada tahun 2005, majalah *The Economist* pernah memuat ulasan perkembangan *finansial global*. Judul depannya: "*The New King of Capitalism*". Pada abad ekonomi

finansial ini, para pemain (investor) di pasar finansial adalah raja baru dalam ekonomi kapitalis. Majalah ini mencatat, dalam periode 2003-2005 pasar ekuitas global tumbuh 60 persen. Jika dihitung selama sepuluh tahun terakhir, perkembangannya mencapai 3.000 persen. Rupanya, liberalisasi finansial yang mulai pesat terjadi di era 1980-an telah menuai hasil yang spektakuler. Meski begitu, para ahli ekonomi finansial sebenarnya juga telah mengingatkan: pesatnya sektor finansial di negara sedang berkembang sangat riskan terhadap krisis ganas. Pada dasarnya, liberalisasi finansial akan diikuti dengan kerawanan finansial yang bisa berakhir dengan krisis finansial. Dalam sistem keuangan yang liberal, krisis nilai tukar kadang datang bersama krisis perbankan. Hasilnya, krisis ganda (*twin crisis*) yang berbahaya.

Penelitian sederhana memberi ilustrasi empiris yang agak berbeda. Guna mendeteksi kesempatan pendanaan yang tak seimbang (*asymmetric financing opportunity*) di antara kedua sektor, studi ini mengukur sensitivitas hubungan antara aliran kas (*cash flow*) dan tingkat investasi perusahaan. Hasilnya, sebelum krisis sektor perdagangan memang memiliki kendala dalam pendanaan (*financing constraints*) yang lebih besar ketimbang sektor nonperdagangan.

Kredit cenderung mengucur lebih besar ke sektor nonperdagangan daripada ke sektor perdagangan. Ada indikasi

ekonomi kita justru tumbuh makin "tidak riil" setelah krisis. Data Bank Dunia menunjukkan, tahun 2004 pertumbuhan sektor perdagangan (*tradable*) di Indonesia 2,9 persen, sementara sektor nonperdagangan (*nontradable*) 7,2 persen. Dan pada tahun 2005 pertumbuhan kedua sektor menjadi 3,5 dan 8 persen. Perbedaannya cenderung melebar. Sebagai catatan, sektor pertanian (bagian dari sektor tradable) hanya tumbuh 2,1 persen pada tahun 2004 dan 2,5 persen pada tahun 2005. Jelas, sektor *nontradable* makin meninggalkan sektor tradable.

Menurut tesis Krugman, ekonomi balon terjadi karena dominasi sektor nontradable, terutama properti. Di Indonesia, indikasi terjadinya ekonomi balon juga bisa dilihat dari tingginya ekspektasi di bursa saham. Pada Januari 2006, nilai tengah (median) dari persentase perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta mendekati 3,3 persen (paling tinggi di seluruh kawasan). Sementara Malaysia hanya tumbuh 1,4 persen, Thailand 2 persen, dan Korea 2,1 persen.

Bisa jadi benar, ekonomi kita sedang penuh dengan janji, harapan, dan euforia yang tidak riil. Sektor finansial mengalami perkembangan yang begitu pesat, sementara sektor riil masih tetap kolaps. Sangat ironis, dana pihak ketiga yang disimpang di SBI jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp.263 triliun. Jumlah itu sudah hampir menyamai besaran uang yang beredar di masyarakat

Rp. 272 triliun. BI harus menyediakan Rp. 23 triliun untuk bunga. Bahkan ada potensi, SBI bisa mencapai Rp.400 triliun jika kondisi kelebihan likuiditas ini tidak terserap disektor riil. Artinya uang hanya berputar disektor keuangan saja.³⁰

e. Kinerja Sekto rill

Krisis keuangan global yang melanda yang melanda dunia sejak 2008 telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor perekonomian, misalnya telah mengganggu stabilitas keuangan dan stabilitas sektor riil, bahkan terhadap pembangunan daerah hal ini merupakan dampak dari krisis keuangan, dimana krisis keuangan memberikan efek terhadap sektor riil. Dan perkembangan sektor riil juga mempengaruhi pembangunan keberlangsungan pembangunan daerah. Maka yang harus penting di perhatikan sekarang bukan hanya sebatas kebijakan disektor keuangan saja tetapi sektor riil juga harus diamankan karena menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Dan kalau terjadi goncangan terhadap sektor riil, maka dunia perbankan menahan diri untuk mengucurkan kreditnya, maka di pastikan akan timbul banyak PHK sehingga akan menambah daftar panjang pengangguran diindonesia.³¹

³⁰Sektor riil, menggerakkan perekonomian, http://makassarpreneur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi, di akses 17 maret 2016.

³¹ Agung Nusantara, Selamatkan Sektor Riil Indonesia, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Pebruari 2009, hal 41.

Dan sebagaimana yang kita ketahui di dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor yaitu sektor riil dan sektor keuangan, sektor riil di bagi dua macam yaitu barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun, belakangan ini malah sektor riil berupa jasa bisa lebih berperan. Misalnya seperti jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan (*advertising*), jasa perawatan (*maintenance*), jasa konsultasi bisnis, jasa pelatihan, jasa rekrutmen karyawan, jasa penjualan, hingga jasa keamanan (*security*) semakin banyak bermunculan mendominasi sektor riil yang berupa barang. Sektor riil yang berupa barang di dalam negeri ini senantiasa mengalami dinamika, malahan terjadi penurunan. Produksi barang-barang dalam negeri cenderung merosot. Hal ini disebabkan perkembangan sektor riil di negeri ini banyak didominasi atau didatangkan dari luar (*impor*) sebagai produsen. Hampir seluruh kebutuhan sektor riil kita disuplai oleh impor. Terutama menyangkut kebutuhan barang-barang berkaitan dengan teknologi. Misalnya seperti barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone, perabotan, rumah tangga sebesar 90% kita dapatkan dari impor. Demikian juga kebutuhan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat semua adalah produk- produk impor. Akibat dari

dimanjakan dengan impor, akhirnya kemampuan bangsa ini untuk memproduksi barang sangat rendah.³²

Berdasarkan keadaan diatas, upaya meningkatkan kinerja sektor riil di Indonesia bukanlah perkara mudah. Perilaku konsumtif sudah sedemikian mengakar dalam masyarakat Indonesia dan cenderung menjadi tidak kreatif dan produktif untuk membangun sektor riil, dan ini berlaku hingga ke daerah- daerah. Dalam hal memproduksi bahan material (fisik) sebagaimana diungkapkan diatas, bisa jadi bangsa ini sudah cukup siap. Namun dalam hal memproduksi barang kebutuhan lainnya, nyatanya bangsa ini masih tergantung pada pasokan dari Negara lain.

Kondisi ini juga mungkin disebabkan oleh nilai investasi dari sektor riil ini yang membutuhkan dana cukup besar dan tentunya hanya bisa dijalani oleh sebagian orang berduit (konglomerat). Hal ini lah yang menjadi penghambat bagi para investor kelas menengah untuk bisa eksis didunia investasi, bukan hal yang aneh karena investasi sektor ini bergerak dibidang properti, perkebunan, manufaktur, dan jasa teknologi. Dan logikanya untuk bisa berinvestasi di perkebunan misalnya tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi. Mulai dari pencarian tempat, kemudian pencarian karyawan, pengelola kebun dan lain sebagainya, tentunya semua itu membutuhkan biaya cukup besar. Berinvestasi di sektor riil berarti

³² Anwar Triwibowo, Sektor Riil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diakses dari <http://www.tamzis.com>, diakses tanggal 25 maret 2016.

kita harus menjadi pelaku utama dari pengelolaan perkembangan bidang tersebut, tetapi bukan berarti mutlak kita harus terjun ke lapangan langsung. Dalam arti lain, investasi sektor riil merupakan sebuah investasi yang cenderung investor harus melakukan pembangunan sebuah infrastruktur yang di harapkan nantinya infrastruktur tersebut bisa mendatangkan pendapatan yang kontinyu di masa depan. Sebagai contoh, investasi di bidang transportasi baik jasa, alat atau media.³³

f. Kebijakan Peningkatan Kinerja Sektor Riil Terhadap Pembangunan Daerah

Sebagai usaha dalam meningkatkan kinerja sektor riil diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat guna mendukung pembangunan daerah. Kebijakan yang dimaksud mencakup kebijakan suprastruktur dalam bentuk akomodasi pembangunan yang termaktub di dalam peraturan perundangan-undangan dan kebijakan infrastruktur yang menjadi penguat kinerja sektor riil dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan dan memperkuat sektor riil, salah satu kebijakan yang perlu digelontorkan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena sektor riil ini merupakan inti dari Negara domestik. Apapun

³³ Sektor Riil dan Financial,
http://portalinvestasi.host56.com/index.php?option=com_content&view=category&id,
di akses tanggal 27 maret 2016.

kebijakannya, jangan mengorbankan UKM karena UKM-lah yang paling banyak menyerap tenaga kerjanya. Kalau banyak UKM ambruk, maka banyak orang yang menganggur yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini, Indonesia sebetulnya memiliki peraturan berupa instruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2007. Tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hanya belum di implementasikan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, inpres tersebut harus benar-benar diimplementasikan sehingga bisa menstimulus sektor riil. Dalam konteks implementasi inpres No.6/2007. Pemerintah berupaya mempertahankan target ekspor sebesar 13-14 persen, meski krisis global sedang menghadang.³⁴

g. Sinergitas Kinerja Sektor Riil Terhadap Pembangunan daerah

Sektor riil merupakan aktivitas pertama dalam pembangunan, baik skala nasional maupun regional terlebih untuk membangun daerah konteks otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan inisiatif dari masyarakat daerahnya sendiri. Langkah ini merupakan upaya bagi penciptaan kemandirian

³⁴ Agung Nusantara, implementasi inpres no 6/2007, Jakarta, hal. 43.

regional dan dalam usaha mencapai kesejahteraan bagi rakyat indonesia keseluruhan.

Aktivitas sektor riil bahkan dalam banyak hal menjadi tolak ukur bagi dinamika pembangunan daerah. Di dalam terdapat upaya untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan di daerah, menyediakan fasilitas-fasilitas publik guna menunjang kehidupan masyarakat, menyediakan berbagai bentuk sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Hal ini juga berarti mengindikasikan bahwa sektor riil memberi dampak terhadap pertumbuhan daerah yang menjadi dasar bagi pembangunan daerah secara keseluruhan konektivitas antara kinerja sektor riil dengan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah seperti dengan menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi.

maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun, ketersediaan infrastruktur masih perlu untuk terus ditingkatkan agar banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan

kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.³⁵

sinergitas kinerja sektor riil untuk pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Agar ke depannya tidak terjadi ketimpangan yang signifikan yang pada akhirnya akan memberi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Lebih jauh, sinergitas ini perlu dibangun agar daerah mampu melaksanakan berbagai amanah yang dibebankan sebagai manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sebab jika tidak, dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut belum layak untuk menjadi daerah yang otonom.

h. Hubungan Sektor Riil dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam tidak di kenal adanya pendikotomian antara sector Moneter dan sektor Riil. Sebagaimana dalam teori endegeus money, kebijakan moneter hanyalah representasi dari sektor riil (Chouwdury,1986). Sektor Moneter dalam definisi ekonomi islam diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar Riil. Jadi, perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor Riil, Khususnya perdagangan.Oleh karenanya, sektor moneter dan sektor Riil saling berkaitan dan berhubungan. Penghapusan bunga disatu sisi

³⁵ Percepatan Pembangunan Infrastruktur,
<http://ml.scribd.com/doc/141351151/bab-33-20091007094529-2158-34>, diakses tanggal 27 maret 2016

dan penerapan loss profit sharing (LPS) disisi lain merupakan built in system yang akan menghubungkan kedua sector ini. Return on investment (ROI) disektor moneter merupakan representasi dari ROI di sektor riil . Hal ini senada dengan perintah Allah SWT, Sebagaimana firman Allah: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba” .Dari ayat tersebut telah tergambar bahwa transaksi jual-beli atau perdagangan merupakan instrument yang ditekankan dalam ekonomi Islam.Artinya perekonomian Islam adalah perekonomian riil.Sementara yang dimaksud dengan sector moneter dalam perekonomian Islam, hanyalah aktivitas yang lebih lebih didominasi oleh kegiatan pengaturan arus kas oleh Negara sebagai penopang sektor riil.

Dalam ekonomi Kapitalis, bunga merupakan jantung dari sector Moneternya, sedang dalam ekonomi islam, jantung dari sector moneternya adalah sistem bagi-hasil (profit and loss sharing). Dalam konsep ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar ditentukan dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yakni ditentukan oleh banyaknya permintaan akan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah

uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.³⁶

Ekonomi Islam tidak mengenal istilah Bunga (riba) dalam setiap kebijakannya. Oleh karena itu, dalam kebijakan moneter pun bunga akan absen.

Umar Chapra (1985) mengungkapkan tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam sistem ekonomi Islam :

1. Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (full employment and economic growth).
2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan yang merata (socio- economic justice and equitable distributin income and wealth)
3. Stabilitas nilai uang (stability in the value fo money)

Fokus dari arah kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan stabilitas perputaran sumber daya ekonomi.

Dengan inilah antara sector riil dan moneter saling berkaitan dan berbanding lurus. Aplikasi dari penerapan kebijakan moneter Islam temporer memang masih hanya Aplikasi dari penerapan kebijakan moneter Islam temporer memang masih hanya sebatas isu-isu para akademisi. Menurut Ali Sakti (2007) sulitnya penerapan moneter Islam, disebabkan: pertama, sector moneter islam memang masih belum berkembang, atau dengan kata lain

³⁶Wikipedia, sektor riil dan moneter, <http://gustani.blogspot.co.id/2012/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html>, diakses tanggal 27 maret.

sektor keuangan Islam masih belum pada tingkat signifikan dan sektor keuangan nasional.

Terdapat perbedaan lingkungan operasional keuangan Islam, dengan apa yang berlaku di keuangan konvensional. Keuangan Islam akan menggambarkan aktivitas ekonomi riil yang menggunakan berbagai jenis transaksi seperti perdagangan dan investasi serta jasa-jasa keuangan. Terlihat bahwa dalam dual economic system, keuangan Islam menjadi penguat aktivitas sektor riil yang menyeimbangi sektor moneter. Sedangkan sektor social economy yang di aplikasikan melalui Zakat, Infak, Shadaqah, dan Waqaf akan semakin menjadi penguat struktur perekonomian riil. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa bentuk instrument moneter Islam berisi berbagai kebijakan-kebijakan yang akan memperlancar arus uang ke sektor riil atau dengan kata lain akan menekan uang beredar yang mengganggu untuk masuk ke sektor riil.

Namun perlu disadari juga bahwa penerapan dual economic system dalam sistem keuangan dapat saja terjadi fenomena dilematis atau trade off antara keuangan Islam dan keuangan konvensional terutama ketika porsi keuangan Islam masih sedikit. Sebagai contoh adalah ketika bank central menaikkan suku bunga di atas tingkat bagi hasil di perbankan syariah. Hal ini akan membuat kontraksi yang cukup berarti di sisi penghimpunan bank

syariah jika para nasabah masih sensitive terhadap kenaikan tingkat suku bunga.³⁷

5. Teori Penetapan Harga dalam Hukum Islam

Menurut Ibn Taimiyah “ jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (al wajah al ma'ruf) bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (irtafa'a al-sa'r) karena pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya jumlah penduduk, demand) itu semua karena Allah SWT. “Dalam hal ini, memaksa penjualan untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haqqin*).

Adapun penetapan harga dibawah ini harga pasar, menurut Imam Malik barang siapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah dia diusir, karenanya, jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga dibawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.³⁸

6. Teori Mekanisme Pasar Islami

Ada beberapa pemikiran dari para pakar Islam tentang teori tersebut, mereka membuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran serta akibatnya terhadap tingkat harga sebagai berikut:

³⁷Wikipedia, sektor riil dan moneter, <http://gustani.blogspot.co.id/2012/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html>, diakses tanggal 27 maret.

³⁸Mustafa kamal, op.cit, H.52-53.

Menurut Abu Yusuf, ” tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah”.³⁹

Pendapat Abu Yusuf diatas seakan membantah dari hubungan negatif antara penawaran dengan tingkat harga sebab pada penawaran saja. Namun juga yang sangat penting adalah kekuatan permintaan dari pembeli. Dan demikian, kenaikan atau penurunan tingkat harga barang tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan atau penurunan produksi. Kemungkinan lain kenaikan harga dilingkungan pedagang masyarakat Indonesia karena ada rencana signifikan kenaikan harga BBM yang menyebabkan perilaku masyarakat pedagang melakukan penumpukan dan menyembunyian barang-barang dagangnya baik sebagian maupun kesemuanya.⁴⁰

Mengenai pengaturan tingkat harga tersebut oleh Ibnu uhan Taimiyah mengatur tingkat harga bersifat lebih menyeluruh dibandingkan sebagian harga yang lainnya, hal tersebut ia mendukung penetapan harga dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya telah naik akibat dimanipulasi selanjutnya ia

³⁹ Deliarnov, H 141.

⁴⁰ Yang dimaksud penumpukan disini adalah penimbunan barang sebelum kenaikan harga.

menyarankan adanya suatu penyediaan industri – industri oleh pemerintah/Negara turut serta memperbaiki tingkat pengupahan jika hal tersebut tidak terjadi secara memuaskan (persaingan bebas) oleh kekuatan-kekuatan pasar.

Imam Al-Ghazali sependapat dengan Ibnu Taimiyah, yang menganggap bahwa industri-industri dan jasa-jasa yang berbeda merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi semua muslim dengan implikasi jika ketersediaan industri dan jasa tersebut tidak mencukupi maka kewajiban Negara sebagai representatif dari semua untuk mengurusnya. Hal ini menggambarkan bahwa kantor industri dan perdagangan adalah kewajiban bersama untuk mengawasinya. Terkait dengan hal tersebut Al-Ghazali mengatakan apabila industri-industri dan perdagangan – perdagangan tersebut ditinggalkan begitu saja, perekonomian akan runtuh dan manusia akan lenyap.⁴¹

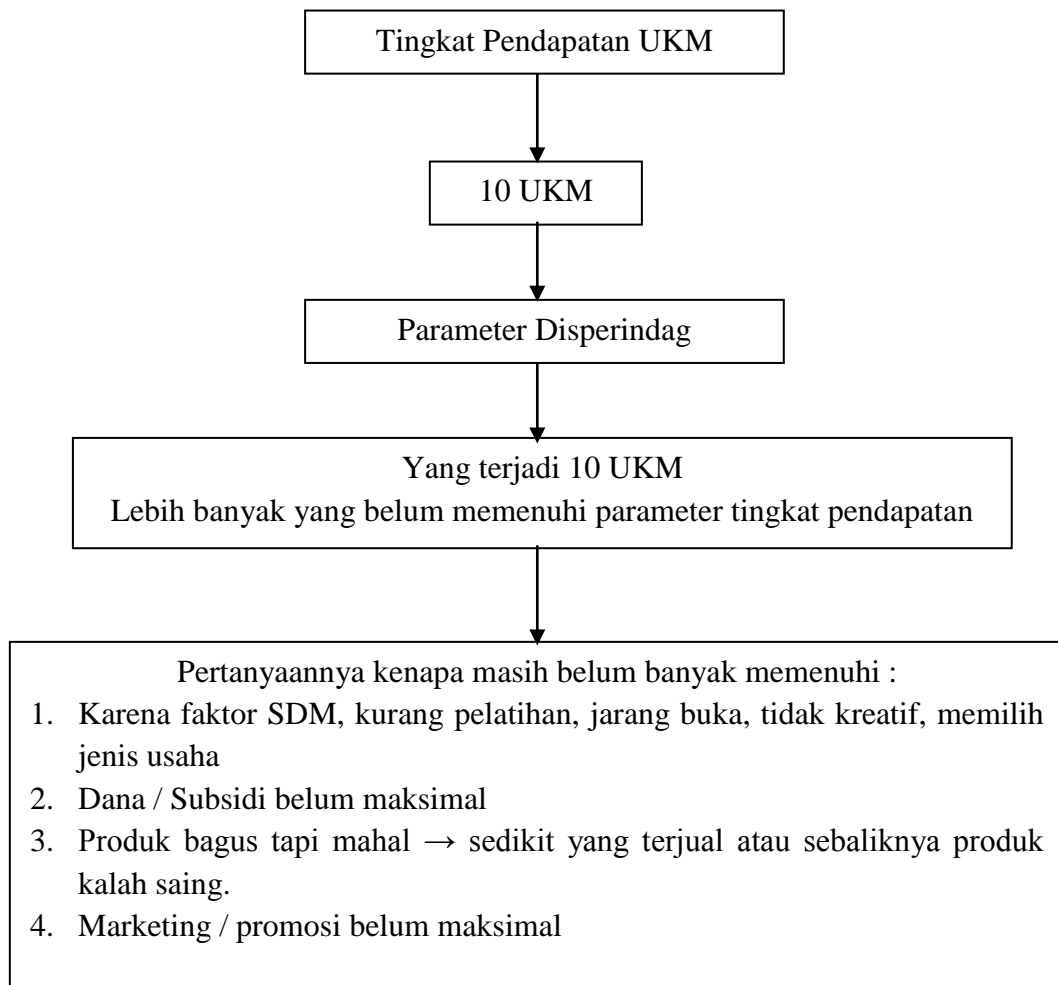
C. Kerangka Berfikir

Dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti seperti di atas, dapat dipahami bawasannya dengan adanya UKM sektor riil bisa berjalan dengan baik. Dan faktanya yang terjadi tingkat pendapatan UKM bisa memperkuat dan memperkokoh sektor riil. Dan membangun ekonomi yang berkembang maka rakyat pun akan hidup sejahtera karena dengan adanya UKM ini tingkat pendapatan menaik dan berkurangnya pengangguran di kehidupan masyarakat dan bertambahnya lapangan

⁴¹ Al-Dhazali, *Ihnya'ulum al-din, (Beirut: Dat al- Nadwah, tt)* juz,h. 106.

pekerjaan. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, berikut sketsa kerangka fikir peneliti:

Peta Pemikiran (*Mind Map*) Peneliti, yaitu:



Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman wawancara untuk disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan)
 - a. Apakah dinas perindag/koperasi Palangka Raya mengayomi UKM palangraya ?
 - b. Apakah ada daftar UKM di prindag Palangka Raya ?
 - c. Bagaimana bentuk pengayoman / pembinaan bantuan disperindag/koperasi kepada UKM?
 - d. Apakah keberadaan UKM menban pertumbuhan ekonomi/sector riil di kota Palangka Raya?
 - e. Sektor riil UKM apa saja yang paling tinggi menyumbang pendapatan ekonomi di Palangka Raya?
2. Pedoman wawancara untuk UKM (usaha kecil dan menengah)
 - a. Bagaimana pendapatan UKM perhari?
 - b. Dalam menjalan kan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya (disperindag/koperasi)?
 - c. Bagaimana mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari disperindag/koperasi?
 - d. Bagaimana cara UKM mengembalikan pinjaman dana dari koperasi/disperindag tersebut?
 - e. Apakah keberadaan alfamart/indomart, berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan adalah selama dua bulan setelah proposal ini di diseminarkan dan mendapatkan izin dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Prodi Ekonomi syariah IAIN Palangka Raya. Namun, jika dalam waktu dua bulan data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka peneliti akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi untuk dianalisis.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di bawah binaan Dinas Perindag. Ada beberapa alasan dalam pemilihan lokasi penelitian, yakni:

1. Sepuluh (10) UKM yang berada dilokasi tersebut
2. Banyaknya UKM yang berkembang
3. Dapat banyak mengetahui ilmu yang di dapat di tempat penelitian tersebut
4. Lokasi tersebut sangat menarik sekali diteliti karena di bawah pemerintah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Nasir *penelitian*

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang di selidiki.⁴² Dalam pendekatan *kualitatif deskriptif* sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁴³

Dengan kata lain *penelitian deskriptif* untuk memperoleh informasi- informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel- variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesis, melainkan hanya mendeskriptifkan informasi apa adanya suatu variabel- variabel yang di teliti.⁴⁴

Dalam penelitian ini, *Pendekatan kualitatif deskriptif* bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas serta menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian tentang tingkatan pendapatan UKM terhadap sektor riil di jalan cempaka kota Palangka Raya.

⁴²Moh, Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.6.

⁴⁴Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 63.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek adalah sebuah konsep, abstraksi atau sesuatu yang diberi batasan jelas dan dimaksudkan untuk sebuah aplikasi. Sebuah objek adalah sesuatu yang mempunyai keadaan, perilaku, dan identitas. Keadaan dari objek adalah satu dari kondisi yang memungkinkan dimana objek dapat muncul, dan dapat secara normal berubah berdasarkan waktu. Keadaan dari objek diimplimentasikan dengan kelompok propertinya (disebut atribut), berisi dari nilai property tersebut, ditambah kethubungan objek yang mungkin dengan objek lainnya. Perilaku menentukan bagaimana sebuah objek beraksi dan bereaksi terhadap permintaan dari objek lainnya. Dipresentasikan dengan kelompok pesan yang direspons oleh objek (operasi yang dilakukan oleh objek).⁴⁵

Objek penelitian ini adalah tingkat pendapatan UKM terhadap sektor riil dikota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek atau **subyek** adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Contoh: "Kamu ditangkap polisi" dan

⁴⁵ Pengertian objek, <http://lussychandra.blogspot.co.id/2014/04/definisi-dan-pengertian-sabjek-predikat.html>, diakses 17 maret 2016.

"polisi menangkap kamu" memiliki pelaku/aktor yang sama, yaitu "polisi" sedangkan subjeknya berbeda: "kamu" dan "polisi".

subjek dari penelitian ini adalah DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan pelaku UKM yang dikelurahan penarung kota Palangka Raya . Adapun kriteria UKM adalah:

- a. Muslim
- b. Yang menjalankan UKM selama minimal dua tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.⁴⁶ Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan metode yang mendukung yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷ observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan. Dimana peneliti tidak akan ikut berperan serta ambil bagian dalam kehidupan subjek penelitian. Peneliti nanti akan mengadakan observasi menurut kenyataan yang terjadi lapangan dengan cara

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,h. 62.

⁴⁷Dedy mulyana, metodologi penelitian kualitatif: paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, (bandung : remaja rosdakarya,2004).hal.181.

melukiskan kata-kata secara cermat dan tepat yang peneliti amati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya menjadi laporan penelitian. Data yang akan dikumpulkan dalam observasi ini. Yaitu tingkat pendapatan ukm terhadap sektor rill di kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untukmendapatkan keterangan-keterangan melalui bercakap-cakap danberhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangankepada peneliti.Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancaramendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dan semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnyadisesuaikan dengan ciri-ciri responden.⁴⁸

Jadi peneliti nanti pertama kali dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancaradengan narasumber secara langsung. Data yang akan peneliti tanyakan adalah yang berkaitan dengan tingkat pendapatan UKM nya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁴⁹Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan menggunakan metode di atas berupa data tertulis yang

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Propodsl*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 64

⁴⁹*Ibid*, h. 136.

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.⁵⁰ Dalam hal ini bisa berupa foto wawancara, dokumen-dokumen ukm, serta data-data yang relevan dengan penelian.

E. Metode Triangulasi Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data.⁵¹

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan persepektif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, dan

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 189.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178

orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵²

Yang dipergunakan untuk penelitian metode nomor 1 dan nomor 5.

F. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya analisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data Reduction* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. *Data Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.
4. *Data Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.179.

diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁵³

⁵³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG TINGKAT
PENDAPATAN UKM (USAHA KECIL DAN MENEGAH)TERHADAP
SEKTOR RIIL DIKOTA PALANGKA RAYA

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30'-114°07' Bujur Timur 1°30'-2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁵⁴

1. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
2. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
4. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572 Km² dan 1.053,14 Km².

⁵⁴ Sumber : Badan Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, 2010.h.3

Tabel. 1

60

No.	Kecamatan	Luas	%
1.	Pahandut	117,25 Km ²	4,4
2.	Sebangau	583,50 Km ²	21,8
3.	Jekan Raya	352,62 Km ²	13,2
4.	Bukit Batu	572,00 Km ²	21,3
5.	Rakumpit	1053,14 Km ²	39,3
Palangka Raya		2678,51 Km ²	100.0

Tabel 2:

Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Kota Palangka Raya, 2014.

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga
Pahandut	Pahandut	96	26
	Penarung	50	15
	Langkai	69	17
	Tumbang Rungan	2	1
	Tanjung Pinang	11	4
	Pahandut Seberang	10	2
	Jumlah Dikecamatan Pahandut		238
Sebangau	Kereng Bengkirai	19	3

	Sabaru	14	3
	Kelampangan	30	5
	Kameloh baru	5	1
	Bereng Bengkel	6	1
	Danau Tundai	2	1
Jumlah Dikecamatan Sebangau		76	14
Jekan Raya	Menteng	74	13
	Palangka	124	25
	Bukit Tunggal	95	16
	Petuk Ketimpun	7	2
Jumlah di Kecamatan Jekan Raya		310	56
Bukit Batu	Marang	7	2
	Tumbang Tahai	7	2
	Banturung	5	3
	Tangkiling	11	3
	Sei Gohong	11	2
	Kanarakan	4	1
	Habaring Hurung	7	2
Jumlah di Kecamatan Bukit Batu		52	16
Rakumpit	Petuk Bukit	5	2
	Pager	3	1
	Panjehang	2	1
	Gaung Baru	1	1
	Petuk Berunai	3	1
	Mungku Baru	3	1
	Bukit Sua	2	1

Jumlah di Kecamatan Rakumpit	19	8
Total RT/RW di Kota Palangka Raya	677	157

2. Sejarah Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan)

Disprindag kota Palangka Raya merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan sebagai dinas perindustrian dan perdagangan juga koperasi yang mengurus perizinan, tempat usaha, penambahan tempat usaha, dan perluasan tempat usaha, berdasarkan Undang-undang Nomo:3 Tahun 1982, tentang peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan DISPERINDAG kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah ini memiliki karyawan sesuai dengan bagian sebagiannya masing-masing bagian memiliki kepala bagian sebagai kepala dinas. DISPERINDAG kota Palangka Raya, Kalimantan tengah ini beralamat di Jln. Tjiik Riwut No98 Km 5,5 Palangka Raya.

. DISPERINDAG ini dibuat pemerintah daerah atas izin dari pemerintah republic Indonesia, ini guna untuk mencegah dan menghindari dari paraktik- praktik usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang, penipuan, dan lain sebagainya. Sisi lain diadakannya DISPERINDAG ini yaitu sebagai alat untuk memberikan binaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kemudian DISPERINDAG membuat sistem perizinan usaha, perpanjangan izin usaha, dll menjadi lebih baik yaitu dibuatnya sistem perizinan terpadu, yang pada awalnya proses perizinan memakan waktu yang agak lama karena diperlukan nya proses survai usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan diadakannya proses perizinan terpadu maka perusahaan yang akan membuat usaha

di Palangka Raya, Kalimantan tengah ini dapat melakukan proses perizinan dengan waktu yang paling cepat yaitu sekitar 3(tiga) hari yang pada awalnya memakan 1 (satu) minggu.

Visi dan Misi

Visi

Meningkatkan pelayanan perizinan usaha dagang dan industri dengan proses yang cepat dan akurat.

Misi

Menambah layanan perizinan dan memudahkan para investor untuk menanamkan investasi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut secara detil. Struktur organisasi dari DISPERINDAG kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Palangkaraya.

Deskripsi Tugas

Dalam setiap instansi, sangat diperlukan adanya saling berkesinambungan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga adanya pembagian pekerjaan mutlak diterapkan dalam setiap bagian yang ada di suatu instansi agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan struktur organisasi pada gambar

2.1 dapat dideskripsikan tugas yang dimiliki oleh tiap-tiap bagian yang

bersangkutan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas sebagai ketua dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kinerja pegawai yang dilakukan di DISPERINDAG kota Palangka Raya. Kepala Dinas berposisi sebagai kepala bagian di dalam DISPERINDAG ini dan satu-satunya yang berhak mengambil keputusan. Selain itu Kepala Dinas juga yang berperan dalam urusan-urusan pengendalian dan penanganan proses perizinan di perusahaan.

2. Kepala TU/ Tugas Umum

Kepala TU/ Tugas Umum merupakan posisi yang berada di bawah kepala dinas langsung atau lebih umum disebut pegawai negeri. Tugasnya hanya membantu si kepala dinas di dalam mengurus dan mengelola perizinan di DISPERINDAG. Namun kadang kepala dinas langsung turun mengikuti proses perizinan secara langsung.

3. Sesi pendaftaran

Sesi pendaftaran merupakan bagian yang berada di bagian pengurusan perizinan usaha perusahaan yang bertugas proses pelengkapan data-data

perusahaan dan proses investasi perusahaan.

4. Sesi Informasi

Sesi Informasi adalah bagian sesi yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam biodata lengkap perusahaan dan melakukan survey berkala untuk melihat kinerja perusahaan. Sesi Informasi sendiri juga berperan aktif untuk mengetahui tujuan, misi, dan visi perusahaan tersebut.

5. Sesi Penetapan

Sesi Penetapan merupakan bagian sesi yang berada di DISPERINDAG kota Palangka Raya. Adalah menyetujui kelayakan apakah perusahaan tersebut legal dan aman untuk kinerjanya suatu saat, sesuai dengan UUD 1945.⁵⁵

3. Sejarah UKM (Usaha kecil dan Menengah)

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk [tanah](#) dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang

⁵⁵ <https://www.google.pl/#q=propil+disperindag+PALANGKARAYA>, diakses tanggal 28 mei 2016.

usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan.
6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kondisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah)

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar

kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2003, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62,0 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian terbesarnya berupa usaha

skala mikro. UMKM telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2004 jumlah UMKM diperkirakan telah melampaui 44 juta unit. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, naik dari 54,5 persen pada tahun 2000. Sementara itu pada tahun 2003, jumlah koperasi sebanyak 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.283 ribu orang, atau meningkat masing-masing 11,8 persen dan 15,4 persen dari akhir tahun 2001.

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2004 dan 2005, antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain RUU tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang KSP, tersusunnya konsep pembentukan biro informasi kredit Indonesia, berkembangnya pelaksanaan unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota dan terbentuknya forum lintas pelaku pemberdayaan UKM di daerah, terselenggaranya bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro dan kecil di 24 propinsi, berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha oleh *BDS providers* di daerah disertai terbentuknya asosiasi *BDS providers* Indonesia, meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis, terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM, serta dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM

berorientasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroindustri. Hasil-hasil tersebut, telah mendorong peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan

globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Secara umum, perkembangan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 diperkirakan masih akan menghadapi masalah mendasar dan tantangan sebagaimana dengan tahun sebelumnya, yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan tertinggalnya kinerja koperasi.

UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.⁵⁶

⁵⁶ <https://www.google.pl/#q=sejarah+usaha+kecil+menengah+di+indonesia,sejarah+usaha+kecil+dan+menengah>, di akses tgl 27 april 2016.

B. Pemaparan Data

1. Tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil dikota Palangka Raya

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan kepala disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) di Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

Informan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi

Nama : Drs. Jenry Saiful Damanik

Nip : 196101031990031008

Jabatan : kabid perdagangan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Mei 2016 di Disperindag Palangka Raya pada jam 08.00 – 09.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah dinas perindag/koperasi Palangka Raya mengayomi UKM Palangka Raya?

JD menjawab: iya, karena di disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) selama ini telah mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap UKM (usaha kecil dan menengah) baik itu masalah produk contohnya seperti usaha anyaman dan kerajinan batik.

2. Apakah ada daftar UKM di perindag (dinas perindustrian dan perdagangan) Palangka Raya ?

JD menjawab: iya ada

3. Bagaimana bentuk pengayoman / pembinaan bantuan disperindag/koperasi kepada UKM?

JD menjawab : bentuk pengayoman / pembinaan disperindag kepada UKM dengan cara mengadakan pelatihan – pelatihan dan mengadakan magang keindustri lainnya.

4. Apakah keberadaan UKM membantu pertumbuhan ekonomi/ sektor riil di kota Palangka Raya ?

JD menjawab : iya, karena untuk kota Palangka Raya masih banyak UKM yang belum terdaftar usahanya.

5. Sektor riil UKM apa saja yang paling tinggi menyumbang pendapatan ekonomi di Palangka Raya ?

JD menjawab : hasil kerajinan –kerajinan batik dan minol (minuman beralkohol).

6. Dari seluruh total sektor riil yang ada di Palangka Raya yang paling banyak menyumbang usaha apa?

JD menjawab :usaha yang paling menyumbang adalah minol (minuman beralkohol)

Responden 1

Nama : SN

Nama Toko/Usaha : Bandeng Jeng Sari

Alamat : Jl intan Gg.Buluh Merindu Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 08.00 – 09.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

SN menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 300.000. sedangkan dana dari modal usaha yang diputar guling diperkirakan Rp. 15. 000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

SN menjawab : iya ada, berupa barang peralatan fresto seperti kompor dan panci nya satu set lengkap dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

SN menjawab : cara saya mengembangkannya dengan cara sistem pemasaran misalnya menyurvei harga pasar terlebih dahulu untuk mengetahui harga yang sebenarnya dan juga di titipkan atau di bagi

kan ke warung-warung supaya usaha saya bisa berkembang dan menjadi kan hasil.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

SN menjawab : menurut saya tidak berpengaruh dengan usaha saya.

Responden 2

Nama : KSJR

Nama Toko/usaha : toko obat insani

Alamat : Jl. Beliang no.1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 09.00-10.00 WIB, permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

KSJR menjawab : pendapat usaha saya perhari nya sebesar Rp. 200.000,- s.d Rp. 300.000 perharinya, sedangkan modal yang di putar guling berkisar Rp. 75.000.000,- pada saat ini.

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

KSJR menjawab : iya ada, berupa barang yaitu kulkas dua pintu dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

KSJR menjawab :cara UKM mengembangkan usahanya adalah dengan cara kerja sama dengan dokter-dokternya untuk meresepkan obat tersebut contohnya suvositoria yaitu obat yang harus disimpan kondisi dingin

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

KSJR menjawab : tidak berpengaruh secara signifikan karena indomart/alfamart hanya menjual obat bebas terbatas yang itemnya tidak sebanyak yang dimiliki oleh toko obat sehat insani sehingga untuk kelengkapan barangnya masih banyak ditemukan ditoko obat insani.

Responden 3

Nama : NAS

Nama Toko/usaha : Jamur Tiram Putih

Alamat : Jl. Kalibata blok D no.f.13

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 10.00-11.00 WIB permasalahan

mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

NAS menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 250.000,- sedangkan modal usaha yang diputar guling berkisar Rp 15.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

NAS menjawab : iya ada berupa stiker dan kemasan, dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

NAS menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya pertama yang saya lakukan adalah memasarkan jamur kepasar klontong dan memasarkannya ke warung-warung juga.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

NAS menjawab : tidak berpengaruh dengan usaha saya

Responden 4

Nama : HC

Nama Toko/usaha : Fotocopy “Media Tama “

Alamat : Jl. RA.Kartini

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 08.00-09.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

HC menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 400.000-500.000 perharinya. Sedangkan modal dana usaha yang diputar guling berkisar Rp. 40.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

HC menjawab : ada berupa alat mesin jilid dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

HC menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan menambahkan modal dari tabungan saya sendiri dan meminjam modal juga ke bank untuk menambah modal buat usaha saya agar bisa berkembang dengan baik.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

HC menjawab : tidak berpengaruh dengan usaha saya

Responden 5

Nama : TS

Nama Toko/usaha : Kerupuk kentang “harapan jaya”

Alamat : Jl. Mawar, kalampangan kecamatan sebangau

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 09.00-10.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

TS menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 2.400.000,- sedangkan modal usaha yang berguling sekitar Rp. 40.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

TS menjawab : ada berupa alat open kerupuk dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

TS menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan cara memasarkannya dengan menggunakan sales saya mempunyai sales berjumlah 3 orang dan mereka yang akan membagikannya ke toko di Palangka Raya

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

TS menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya

Responden 6

Nama : SJO

Nama Toko/Usaha : Peramanan Gesang Arum Garden/jasa bangunan

Alamat : Jl. Lambung mangkurat

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 09.00-10.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

SJO menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 400.000-500.000,- sedangkan modal usaha berkisar Rp. 45.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

SJO menjawab : ada berupa alat cetak batako dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

SJO menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan cara mengeluarkan modal dari tabungan saya sendiri untuk membeli bahan-bahan dan saya juga pekerja taman dan hasilnya pun bisa menambah modal dari usaha saya.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

SJO menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya

Responden 7

Nama : HGS

Nama Toko/usaha : Kirana production / batu akik

Alamat : Jl. Bakut no.4

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 10.00-11.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari
Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

HGS menjawab : Pendapatan usaha saya perhari tidak menentu.
Sedangkan modal usaha Rp. 10.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak
pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

HGS menjawab : iya ada berupa mesin batu, mesin gosok dan mesin
poles dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan,
karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan
dari koperasi perindag?

HGS menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan cara
memasarkan nya lewat media online seperti IG, Facebook,WA dan
sosial media lainnya. Alamat nya [www.pengrajinbatuPalangka
Raya.wordpress.com](http://www.pengrajinbatuPalangkaRaya.wordpress.com).

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap
penghasilan UKM?

HGS menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya.

Responden 8

Nama : AMH

Nama Toko/usaha : Keripik Kentang

Alamat : Jl.Anggrek No.71

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 08.00 – 09.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

AMH menjawab : Pendapatan usaha saya perhari sebesar Rp 700.000,- perharinya , sedangkan modal usaha yang bergulir berkisar Rp. 40.000.000,-

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

AMH menjawab : iya ada berupa stiker dan kemasan, bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

AMH menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan cara memasarkannya dan membagi nya ke warung-warung agar usaha saya bisa berkembang.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

AMH menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya

Responden 9

Nama : ATN

Nama Toko/usaha : Depot air minum mineral isi ulang

Alamat : Jl. Nyai balau

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 11.00 – 12.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari

Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

ATN menjawab : Rp. 100.000,-, sedangkan modal dana yang bergulir diperkirakan Rp. 20.000.000,- perbulan.

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

ATN menjawab : iya ada berupa galon penampung air 1000 liter dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

ATN menjawab : menawarkan jasa pengisian air isi ulang ke rumah-rumah

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

ATN menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya.

Responden 10

Nama : IRM

Nama Toko/Usaha : Bengkel Motor

Alamat : Jl. RTA Milono palangka raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 27 Mei 2016 di UKM Palangka Raya pada jam 10.00 – 11.00 WIB permasalahan mengenai tingkat pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) terhadap sektor riil di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan UKM (usaha kecil dan menengah) perhari

Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disperindag?

IRM menjawab : Rp. 400.000,- , sedangkan modal yang berguling setiap bulannya diperkirakan Rp. 15.000.000,-. perbulan

2. Dalam menjalankan UKM, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah kota Palangka Raya atau disperindag/koperasi?

IRM menjawab : ada, berupa bantuan peralatan montir dan bantuan tersebut tidak perlu dibayar atau dikembalikan, karena bentuknya hibah dari perindag Palangka Raya.

3. Bagaimana UKM mengembangkan usaha setelah mendapat bantuan dari koperasi perindag?

IRM menjawab : cara saya mengembangkan usaha saya dengan cara, meminjam dana dari bank BRI untuk membeli barang perbengkelan seperti ban/ucus motor, oli, ger, rantai motor dll.

4. Apakah keberadaan alfamart/ indomart berpengaruh terhadap penghasilan UKM?

IRM menjawab : tidak berpengaruh terhadap usaha saya

Dari laporan hasil penelitian di atas, peneliti rangkum dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3

Inisial Pelaku UKM, Alamat, Jenis Usaha dan Hasil Per-hari

Inisial UKM	Alamat toko/kios	Jenis Usaha	Hasil /hari
1. SN	Bandeng Jeng Sari	Ikan presto	Rp. 300.000
2. KSJR	Jl. Beliang no.1	Toko Obat	Rp. 200.000
3. NAS	Jl. Kalibata blok D no.f.13	Jamur Tiram Putih	Rp. 250.000
4. HC	Jl. RA.Kartini	Fotocopy	Rp. 400.000
5. TS	Jl. Mawar, kalamangan	Kerupuk kentang	Rp. 2.400.000
6. SJO	Jl. Lambung mangkurat	Jasa bangunan	Rp. 400.000
7. HGS	Jl. Bakut no.4	Batu akik	Tidak menentu
8. AMH	Jl.Angrek No.71	Keripik Kentang	Rp. 700.000
9. ATN	Jl. Nyai Balau	Depot air isi ulang	Rp. 100.000,-
10. IRM	Jl. RTA. Milono	Bengkel Motor	Rp. 400.000,-

Dari 10 pengusaha kecil dan menengah tersebut ada 9 responden memiliki kepastian pendapatan perhari, sedangkan 1 orang responden tidak dapat menyatakan kepastian pendapatan usahanya.

Tabel 4.
Pendapatan Responden Per-Bulan

No	Responden	Usaha	Pendapatan	
			Per- Hari	Per- Bulan
1	SN	Ikan presto	Rp. 300.000,-	Rp. 9.000.000,-
2	KSJR	Toko Obat	Rp. 200.000,-	Rp. 6.000.000,-
3	NAS	Jamur Tiram Putih	Rp. 250.000,-	Rp.7.500.000,-
4	HC	Fotocopy	Rp. 400.000,-	Rp. 12.000.000,-
5	TS	Kerupuk kentang	Rp. 2.400.000,-	Rp. 72.000.000,-
6	SJO	Jasa bangunan	Rp. 400.000,-	Rp. 12.000.000,-
7	HGS	Batu akik	Tidak menentu	-
8	AMH	Keripik Kentang	Rp. 700.000,-	Rp. 21.000.000,-
9	ATN	Depot air isi ulang	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-
10	IRM	Bengkel Motor	Rp. 400.000,-	Rp. 12.000.000,-

Jika dicermati tabel di atas responden yang menyatakan penghasilan perhari berkisar paling rendah Rp. 100.000,- (responden 9 ; ATN, Depot air isi ulang) sedangkan penghasilan tertinggi per-hari Rp. 2.400.000,- (responden 5 ; TS, pengusaha kerupuk kentang).

Tabel 5
Modal Usaha di Putar Guling UKM

No	Responden	Usaha	Modal Usaha
1	SN	Ikan presto	Rp. 15. 000.000,-
2	KSJR	Toko Obat	Rp. 75.000.000,-
3	NAS	Jamur Tiram Putih	Rp 15.000.000,-
4	HC	Fotocopy	Rp. 40.000.000,-

5	TS	Kerupuk kentang	Rp. 40.000.000,-
6	SJO	Jasa bangunan	Rp. 45.000.000,-
7	HGS	Batu akik	Rp. 10.000.000,-
8	AMH	Keripik Kentang	Rp. 40.000.000,-
9	ATN	Depot air isi ulang	Rp. 20.000.000,-
10	IRM	Bengkel Motor	Rp. 15.000.000,-

Tabel 6

Bantuan dari Perindag ke UKM dan Pengembangan Usaha

Inisial UKM	Alamat toko/kios	Jenis bantuan	Pengembangan Usaha
1. SN	Bandeng Jeng Sari	Alat fresto ; kompor dan panci	membagikan dagangan fresto ke warung-warung
2. KSJR	Jl. Beliang no.1	Kulkas	kerja sama dengan dokter
3. NAS	Jl. Kalibata blok D no.f.13	stiker dan kemasan	memasarkan jamur kepasar klontong dan kewarung warung
4. HC	Jl. RA.Kartini	alat mesin jilid	dengan meminjam modal juga ke bank
5. TS	Jl. Mawar, kalampangan	alat open kerupuk	menggunakan jasa salesuntuk membagikan barang kios-kios
6. SJO	Jl. Lambung mangkurat	alat cetak batako	Jasa pekerja taman
7. HGS	Jl. Bakut no.4	Mesin belah, gosok dan poles batu akik	Memasarkan batu akik melalui medsos ; IG, Facebook dan WA
8. AMH	Jl.Anggrek	stiker dan	Memasarkan melalui warung-

	No.71	kemasan	warung di Palangka Raya
9. ATN	Jl. Nyai Balau	galon penampung air 1000 liter	Menawarkan jasa isi ulang air ke para konsumen
10. IRM	Jl. RTA. Milono	peralatan montir	pinjam dana dari BRI

Dari semua barang bantuan yang diberikan oleh kantor Dinas Perindustrian Koperasi dan Perdagangan Kota Palangka Raya, menurut para pengusaha kecil dan menengah di Palangka Raya binaan Perindag, mereka tidak mengembalikan bantuan tersebut, sebab semua bantuan yang diberikan barang ataupun peralatan berbentuk hibah. Adapun keberadaan para pedagang modern seperti Alfamart, indomaret dan sebagainya menurut para UKM tidak berpengaruh dengan penghasilan mereka sehari-hari.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisis hasil penelitian yang berjudul : Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Sektor Riil di Kota Palangka Raya, sebagai berikut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Responden 1 (JD), kabit perdagangan kota Palangka Raya. Menjelaskan bahwa “Dinas Perindustrian dan Pedagangan (dinas perindustrian dan perdagangan) selama ini telah mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap UKM (usaha kecil dan menengah).

Selanjutnya sektor riil UKM yang paling tinggi menyumbang pendapatan ekonomi di Palangka Raya menurut JD adalah hasil kerajinan-kerajinan batik dan minol (miniman beralkohol) Selanjutnya sektor riil UKM yang paling tinggi

menyumbang pendapatan ekonomi di Palangka Raya menurut JD adalah hasil kerajinan-kerajinan batik dan minol (minuman beralkohol).

Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha, dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha, terkait dengan definisi tersebut menurut peneliti pengertian dari tingkat pendapatan adalah derajat hasil kerja atau hasil pencarian atau hasil jerih payah masyarakat untuk sebuah usaha yang masih berjalan dan layak untuk didirikan dan dipertahankan. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah merugi.

Sebagaimana yang telah digambarkan dalam laporan hasil penelitian di atas, bahwa ada 9 orang responden yang menyebutkan hasil usaha mereka perhari cukup bervariasi pendapatan mereka, yaitu usaha ikan presto, toko obat, jamur tiram, fotocopy. Selain itu ada satu responden yaitu usaha batu akik yang tidak menyebutkan secara pasti penghasilan mereka.

Dari 9 responden yang telah mengemukakan hasil pendapatannya perhari, rata-rata penghasilan perhari di bawah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), hanya satu responden yang memiliki penghasilan di atas Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yaitu usaha kerupuk kentang dengan penghasilan Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus). Untuk penghasilan terendah adalah usaha depot air isi ulang.

Maka menurut pandangan peneliti jika dilihat dari nilai kepemilikan modal usaha, dihubungkan dengan tabel atau bagan tentang kriteria UMKM di bawah ini :

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Milia

maka para pengusaha UKM di bawah binaan Dinas Perindag Kota Palangka Raya yang peneliti teliti ini hanya 1 responden yang masuk dalam kriteria UMKM yaitu pemilik toko obat responden no. 2 berinisial KJSR dengan modal Rp. 75.000.000,00 berstatus pengusaha **mikro** dan hal inipun hanya dilihat dari sisi modal yang bergulir, sedangkan jika dilihat dari hasil yang diperolehnya per-hari yang berjumlah Rp. 200.000,00 berarti sebulan ia mendapat Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang berarti setahun Rp 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)

Dari kisaran hasil di atas, maka pengusaha toko obat dengan inisial KJSR belum dapat dikategorikan masuk dalam kategori UMKM, peneliti katakan demikian sebab jika mengacu pada tabel di atas dan uraian yang di deskripsikan bahwa usaha yang memasuki kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan yang termasuk kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan yang termasuk kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)⁵⁷, sedangkan pengusaha toko obat mengatakan bahwa modalnya yang bergulir adalah sebesar Rp 75.000.000,- bukanlah keuntungan bersih, melainkan berupa uang yang beredar dalam usahanya.

Dengan demikian, jika pengusaha pengusaha KJSR yang bermodal Rp 75.000.000,- saja maka dia tidak masuk kategori usaha mikro menengah, sehingga pengusaha lainnya yakni 9 responden lain yang bermodal di bawah Rp 75.000.000,- juga tidak termasuk kategori yang serupa. Meski demikian peneliti lebih cenderung memasukan mereka dalam konsep kriteria usaha kecil yaitu usaha

⁵⁷Lihat, Wikipedia, umkm, <https://www.gogle.com/pentingnya-peran-umkm-dalam-pembangunan.htmln-klasifikasi-umkm.html>, di akses 15 maret 2016.

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang-cabang yang dimiliki, yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Meski demikian, berdasarkan fakta yang telah peneliti temukan pada pengusaha kecil dalam binaan Dinas Perindag kota palangka raya, maka menurut pandangan peneliti harus diakui bahwa para pengusaha ini merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, sebab dari aktifitas mereka inilah perekonomian masyarakat hidup dan bergulir sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya mengalami pergerakan di Palangka Raya, tanpa pengusaha kecil yang membuka usahanya di setiap sudut jalan-jalan besar ataupun kecil di kota Palangka Raya maka masyarakat masyarakat akan mendapat kesulitan mendapat bahan kebutuhan mereka, karena harus pergi ke pasar besar seperti pasar kahayan ataupun pasar besar yang jaraknya cukup jauh dan memakan waktu di setiap harinya. Dalam analogi peneliti bahwa dengan adanya para pengusaha kecil yang membuka usahanya di berbagai sudut kota Palangka Raya tersebut, menjadikan tambahan penghasilan bagi pajak usaha harian dinas pajak untuk memungut redistribusi pajak ketika para pengusaha membuka usahanya di setiap harinya, perkiosnya dikenakan redistribusi minimal Rp. 2000,-, kemudian dikalikan jumlah pedagang kecil (misal) 1000 orang, maka pendapatan dinas pajak per-hari Rp. 2.000.000,- .

Untuk menopang peran pengusaha pedagang kecil dalam mendorong perekonomian kota Palangka Raya, peneliti mengakses info yang menggambarkan hasil dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Palangka Raya⁵⁸ bahwa pada tahun 2013 dimana BRI mengakomodir 12.664 nasabah dengan beragam usaha seperti perdagangan, home industri, kerajinan, usaha konfeksi dan sebagainya, pengucuran yang disalurkan BRI pada saat itu sebesar Rp 246,51 miliar. Masih terkait dengan informasi tentang KUR ini peran kredit usaha rakyat sangat dirasakan manfaatnya, karena memiliki beberapa kelebihan, pertama persyaratan mudah dan ringan dimana bagi nasabah KUR mikro atau dengan kredit dibawah 20 juta cukup memiliki usaha yang sudah berjalan 6 bulan, photo copy KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha serta tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya provisi, kedua bunga kredit yang ringan yakni sebesar 0,57-0,95 % per-bulan, ketiga proses administrasi relatif cepat yakni berkisar 2-5 hari untuk KUR mikro dan 7-15 hari untuk KUR makro. Kelebihannya adalah terkait cicilan khusus untuk KUR makro pada 6 bulan pertama nasabah bisa membayar bunganya saja, sementara cicilan pokoknya bisa dibayar belakangan.

Dengan bersinerginya BRI cabang Palangka Raya terhadap pengusaha kecil tersebut dikarenakan kecermatan bank BRI terhadap Peran usaha kecil dan menengah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah itu sendiri. Mengingat peran penting dari para pengusaha kecil yang memiliki strategi tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi di palangka raya secara khusus maupun

⁵⁸ Lihat, setkab.go.id/kur-meningkat, diakses 25 juni 2016.

bagi kemajuan ekonomi negara Indonesia , dimana dapat dicermati bahwa pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, usaha kecil merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan usaha kecil dan menengah diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami usaha kecil, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh usaha kecil di Indonesia cukup baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya keamanan. Adapun peran usaha kecil tersebut ialah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan arus urbanisasi serta motor penggerak bagi pembangunan nasional dan daerah.⁵⁹ Lebih lanjut menurut Eko, ada beberapa ciri spesifik mengenai usaha kecil, pertama, struktur sangat sederhana; kedua sedikit aktivitas yang diformalkan; ketiga, teknologinya sederhana; keempat, manajemennya lentur; kelima, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana serta aman elaborasi.⁶⁰

Terkait dengan ungkapan Eko di atas, peran usaha kecil dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang tersebar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi,

⁵⁹ Lihat, Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

⁶⁰ Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

(5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis dalam semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.⁶¹

Kembali pada argumentasi Eko memaparkan bahwa usaha kecil juga memanfaatkan sumber daya alam (SDM) yang berpotensi disuatu daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha kecil dapat membantu mengolah SDA yang ada disetiap daerah maka hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Fungsi keberadaan usaha kecil yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja dimana mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Apalagi orang-orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal ini menjadi lebih menarik untuk menjadikan usaha sendiri karena mereka merasa bebas dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha yang kecil terlebih dahulu.⁶²

Apa yang di gambarkan Eko tersebut erat kaitannya dengan para pengusaha kecil kota Palangka Raya, dimana peran usaha kecil sangatlah strategis dalam perekonomian Palangka Raya pada khususnya dalam menujung lanjutnya perekonomian nasional, oleh karena itu pengusaha kecil perlu menjadi faktor pembangunan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Dengan dibukanya bantuan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh BRI Palangka Raya dapat membantu pengembangan lapangan pekerjaan yang lebih luas baik itu dengan berwirausaha dan sebagainya yang tentunya sangat berdampak positif mengurangi

⁶¹Lihat, Usaha mikro, <http://salria-sig.blogspot.com/2011/05/latar-belakang-ukm-usaha-kecil-menengah.html>. diakses 27 maret 2016.

⁶²Lihat, Eko Prasetyo, peran usaha mikro dan menengah dalam kebijakan penanggulan kemiskinan dan pengangguran, pdf, h.5. Dalam <http://does.google.com/viewer/upi,go,id/adminjurnal/208/18>. Diakses 27 maret 2016.

tingkat pengangguran yang ada di kota ini serta dapat juga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Terkait dengan perlunya sinergi para pihak terkait yakni lembaga pemerintah Dinas Perindag kota Palangka Raya dan lembaga keuangan dalam membackup pengusaha kecil tersebut adalah guna mempercepat pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Palangka Raya dalam mengambil kebijakan harus selalu mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagai unsur dalam pemerintah daerah, bisnis, organisasi nirlaba⁶³ dan penduduk lainnya. Lintas pelaku disini harus bekerjasama untuk membuat kerangka kerja formal dan informal atau lembaga untuk mendorong interaksi dan mengatur hubungan antar lembaga. Fleksibilitas harus menjadi kunci dari kerangka kerja dan lembaga yang harus menyalurkan perhatian dan kepentingan yang relevan dalam proses dan mobilisasi sumber daya masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh BRI cabang Palangka Raya dalam memberikan pinjaman kepada para nasabah pengusaha kecil pada tahun 2003 sebagaimana di gambarkan di atas.

Langkah selanjutnya untuk percepatan pembangunan, dalam hal ini pemerintahan daerah mungkin memerlukan pendirian suatu organisasi persatuan pengembangan khusus, yang bertanggungjawab dalam pengkoordinasian seluruh lintas pelaku dan berfungsi sebagai juru bicara rencana aksi yang ingin dituju. Organisasi ini harus membentuk jejaring untuk pembangunan daerah untuk peningkatan efisiensi pengalokasian sumberdaya serta berbagai pengetahuan dan informasi. Operasionalisasi dan pembiayaan organisasi ini harus didukung oleh

⁶³ Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil serta tidak mencari labaa (moneter).

lintas pelaku daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan UKM terhadap sektor riil di Palangka Raya dengan mempertimbangkan keberlanjutan pada semua tahapan perencanaan dan implementasi untuk menjamin suatu lingkungan usaha yang sehat. Sejalan dengan tren desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam pembangunan, otoritas pemerintah daerah harus menyediakan petunjuk dan bantuan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan strategi pengusaha kecil di Palangka Raya.

Ungkapan peneliti di atas dimaksudkan untuk membuka kreatifitas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan UKM, sebab jika dilihat dari modal usaha mereka yang belum memenuhi kriteria UMKM sebagaimana tabel modal usaha responden berikut :

Tabel 5

Modal Usaha di Putar Guling UKM

No	Responden	Usaha	Modal Usaha
1	SN	Ikan presto	Rp. 15.000.000,-
2	KSJR	Toko Obat	Rp. 75.000.000,-
3	NAS	Jamur Tiram Putih	Rp 15.000.000,-
4	HC	Fotocopy	Rp. 40.000.000,-
5	TS	Kerupuk kentang	Rp. 40.000.000,-
6	SJO	Jasa bangunan	Rp. 45.000.000,-
7	HGS	Batu akik	Rp. 10.000.000,-
8	AMH	Keripik Kentang	Rp. 40.000.000,-
9	ATN	Depot air isi ulang	Rp. 20.000.000,-
10	IRM	Bengkel Motor	Rp. 15.000.000,-

tabel di atas menggambarkan bahwa modal responden yang peneliti teliti dihubungkan dengan usaha yang mereka jalankan tidak lah memenuhi kriteria UMKM yaitu usaha yang memasuki kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan yang termasuk kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan yang termasuk kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bantuan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun modal pengusaha yang terdapat pada tabel di atas hanya sekedar untuk mereka beratahan hidup, terkait dengan kondisi pelaku usaha tersebut maka diperlukan strategi dari pemerintah terkait untuk menambah tingkat pendapatan usaha mereka agar mencapai kesejahteraan hidup yang di inginkan.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan berdasarkan keterangan dalam wawancara, bahwa para responden pengusaha pada dasarnya telah mendapat

bantuan dari dinas Perindag kota Palangka Raya, antara lain barang-barang antara lain; Alat fresto ; kompor dan panci, Kulkas, stiker dan kemasan, alat mesin jilid, alat open kerupuk, alat cetak batako, Mesin belah, gosok dan poles batu akik, galon penampung air 1000 liter dan peralatan montir bengkel. Dari semua barang bantuan yang diberikan oleh kantor Dinas Perindustrian Koperasi dan Perdagangan Kota Palangka Raya, menurut para pengusaha kecil dan menengah di Palangka Raya binaan Perindag, mereka tidak mengembalikan bantuan tersebut, sebab semua bantuan yang diberikan barang ataupun peralatan berbentuk hibah. Adapun keberadaan para pedagang modern seperti Alfamart, indomart dan sebagainya menurut para UKM tidak berpengaruh dengan penghasilan mereka sehari-hari.

Tabel 6

Bantuan dari Perindag ke UKM dan Pengembangan Usaha

Inisial UKM	Alamat toko/kios	Jenis bantuan	Pengembangan Usaha
SN	Bandeng Jeng Sari	Alat fresto ; kompor dan panci	membagikan dagangan fresto ke warung-warung
SJR	Jl. Beliang no.1	Kulkas	kerja sama dengan dokter
NAS	Jl. Kalibata blok D no.f.13	stiker dan kemasan	memasarkan jamur kepasar klontong dan kewarung warung
HC	Jl. RA.Kartini	alat mesin jilid	dengan meminjam modal juga ke bank
TS	Jl. Mawar, kalampangan	alat open kerupuk	menggunakan jasa salesuntuk membagikan barang kios-kios
SJO	Jl. Lambung mangkurat	alat cetak batako	Jasa pekerja taman
HGS	Jl. Bakut no.4	Mesin belah, gosok dan poles batu akik	Memasarkan batu akik melalui medsos ; IG, Facebook dan WA

AMH	Jl. Anggrek No.71	stiker dan kemasan	Memasarkan melalui warung-warung di Palangka Raya
ATN	Jl. Nyai Balau	galon penampung air 1000 liter	Menawarkan jasa isi ulang air ke para konsumen
IRM	Jl. RTA. Milono	peralatan montir	pinjam dana dari BRI

Meski jika dilihat dari nilai bantuan yang diberikan oleh Dinas Perindag kepada pengusaha kecil di Palangka Raya, sebatas barang-barang yang identik dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka tekuni dan barang tersebut merupakan hibah, namun menurut pencermatan peneliti upaya bantuan tersebut perlu ditingkatkan dalam bentuk permodalan kredit begulir dengan pengawalan⁶⁴ agar mereka yang sudah produktif sebelum mendapat bantuan dari pemerintah akan lebih produktif lagi hingga ketaraf peningkatan masuk dalam kategori UMKM dengan modal dan penghasilan yang dapat mensejahterakannya.

Masyarakat pengusaha di kota palangka raya umumnya beraktifitas sebagai pengusaha kecil hanya bersifat otodidak sejak lama jauh sebelum lahirnya Undang-Undang tentang UMKM, meski demikian mereka sangat ulet dan tangguh dalam menekuni usahanya, hal ini menjadi modal awal masyarakat indonesia yang bergerak dibidang usaha kecil yang kemudian di dukung dengan lahirnya undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah(UMKM). Dimana usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi

⁶⁴ Maksud dengan pengawalan disini adalah adanya evaluasi per-3 bulan sekali dari pihak pembina UMKM, sehingga para pelaku usaha kecil merasa terawasi pekerjaannya dengan demikian harus jujur, cermat dan ulet dalam menjalankan aktifitas usahanya. Jika mereka tidak serius dalam melaksanakan usahanya, maka perlu dikenakan sanksi, misal izin usaha dicabut.

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁶⁵

Meskipun banyak sudut pandang tentang hakikat atau kriteria usaha mikro (kecil), namun secara substantif sudut pandang tersebut memiliki kesamaan. Yang dimaksud dengan kesamaan disini menurut peneliti adalah kesamaan dalam produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jika dihubungkan dengan UU.No.9 Tahun 1995 melihat usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dalam hal ini untuk pengusaha yang ada di palangka raya yang telah peneliti teliti tidaklah demikian, karena umumnya mereka tidak punya modal ataupun penghasilan yang besar.

Mencermati perkembangan UMKM di Palangka Raya yang cukup banyak sebagaimana yang termuat dalam terdFTAR arsip data di dinas Perindag Palangka Raya dan mungkin juga di berbagai wilayah kabupaten kota di Indonesia, usaha skala kecil ini seyogyanya menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil

⁶⁵Lihat, Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*, Graga ilmu, Yogyakarta, 2009, h.32.

tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluas angkatan kerja dan menyediakan fleksibilitas serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana keberadaan UMKM Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi negara ini. Oleh karenanya UMKM peting untuk dikembangkan dan di pertahankan. Hal ini sering pula dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha di sektor tradisional maupun modern serta mampu menyerap banyak tenaga kerja, hal ini pula-lah yang kemungkinan terjadi di Palangka Raya kenapa perlunya peningkatan pendapatan UKM di diperhatikan oleh pemerintah daerah, mengingat peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu departemen perindustrian dan perdagangan, serta departemen koperasi dan UMKM. Perkembangan UMKM di harapkan dapat memberikan upaya –upaya

penanggulangan masalah-masalah pengangguran dan ketiadaan lapangan kerja yang bersifat kemandirian.

Adapun Peran dan fungsi usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat, dikarenakan usaha kecil semacam ini memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu aktifitas ini juga berperan dalam pemerataan pendapat, karena mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi, kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapat.

Selain itu dari sisi pembangunan ekonomi daerah, aktifitas usaha kecil ini memiliki nilai tambah bagi produk daerah, dimana setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam Kalimantan tengah ini dikelola oleh pengusaha kecil sebagai professional, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produksi itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah ini.

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha kecil, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁶⁶

⁶⁶Lihat, Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*, Graga ilmu, Yogyakarta, 2009, h.32.

Dalam ranah ilmu ekonomi Islam fenomena usaha perekonomian masyarakat kecil bukanlah suatu disiplin ilmu baru, banyak karya intelektual muslim klasik yang mengupas berbagai aspek yang menjadi subjek materi ekonomi modern sejak abad VIII hingga XI M (1047M) seperti karya-karya Risalat al-shahabah'abd allah ibn al-muqaffa (109-147H/727-762M) yang mengupas kebijakan dan administrasi keuangan Negara, kitab al-Kharaj, Karya Abu Yusuf (113-182H/731-789M) yang membahas tentang kebijakan fiskal, kitab al-Amwal Abu'Ubaid al-Qasim ibn Sallam (157-224H/774-838M) yang membahas kebijakan keuangan negara. Bahkan sederet nama seperti Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1283-1328), dan Ibn Khaldun (1332-1404) memiliki andil dan sumbangan pemikiran yang tidak kecil bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam, dimana pemikiran-pemikiran ekonomi mereka tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama agar tidak sekuler, fragmentasi, dan bebas-nilaian pengetahuan yang kini banyak dikritisi karena kelemahan-kelemahannya yang semakin meluas.

Artinya para pemikir Islam di masanya telah memiliki upaya kearah pemberdayaan usaha kecil sesungguhnya mengandung stigma dimana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidak berdayaan disatu sisi, namun disisi lain pemberdayaan usaha kecil mengisaratkan fakta adanya dikotomi antara dua kekuatan yang semestinya berdampingan secara sinergik, yaitu usaha kecil sebagai representasi dari ekonomi rakyat (wong cilik) versus ekonomi kuat (konglomerat).

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

Dalam ekonomi Islam tidak melarang hukum berbisnis, hanya saja dalam Islam tidak dikenal adanya pendikotomian antara sektor Moneter dan sektor Riil. Sebagaimana dalam teori endogenous money, kebijakan moneter hanyalah representasi dari sektor riil. Sektor Moneter dalam definisi ekonomi Islam diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar Riil. Jadi, perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor Riil, Khususnya perdagangan, oleh karenanya sektor moneter dan sektor Riil saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT, Sebagaimana firman Allah: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba”. Ayat tersebut telah tergambar bahwa transaksi jual-beli atau perdagangan merupakan instrument yang ditekankan dalam ekonomi Islam, artinya perekonomian Islam adalah perekonomian riil. Sementara yang dimaksud dengan sektor moneter dalam perekonomian Islam, hanyalah aktivitas yang lebih didominasi oleh kegiatan pengaturan arus kas oleh Negara sebagai penopang sektor riil. Sementara dalam ekonomi Kapitalis, bunga merupakan jantung dari

sektor Moneter, sedang dalam ekonomi Islam, jantung dari sektor moneter adalah sistem bagi-hasil (profit and loss sharing). Dalam konsep ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen, menurut ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar ditentukan dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yakni ditentukan oleh banyaknya permintaan akan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.⁶⁷

Selanjutnya dalam Ekonomi Islam tidak mengenal istilah Bunga (riba) dalam setiap kebijakannya. Oleh karena itu, dalam kebijakan moneter pun bunga akan absen. Artinya para pedagang boleh melakukan usaha pengembangan perdagangannya tetapi dalam penjualan barang produksi mereka yang terlalu menarik untung yang berlebih-lebihan yang berdampak pada kesan adanya riba dalam jual beli. Terkait dengan bahasan ini Umar Chapra mengungkapkan tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam sistem ekonomi Islam : *pertama*, Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and economic growth*); *kedua* Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan yang merata (*socio- economic justice and equitable distributin income and wealth*); dan *ketiga*, Stabilitas nilai uang (*stability in the value fo money*) Fokus dari arah kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan stabilitas perputaran sumber daya ekonomi. Dengan inilah antara sektor riil dan moneter saling berkaitan dan berbanding lurus, aplikasi dari penerapan kebijakan moneter

⁶⁷Lihat, Wikipedia, sektor riil dan moneter, <http://gustani.blogspot.co.id/2012/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html>, diakses tanggal 27 maret.

Islam temporer memang masih hanya aplikasi dari penerapan kebijakan moneter Islam temporer memang masih hanya sebatas isu-isu para akademisi. Meski demikian sulitnya penerapan moneter Islam, disebabkan : pertama, sektor moneter Islam memang masih belum berkembang, atau dengan kata lain sektor keuangan Islam masih belum pada tingkat signifikan dan sektor keuangan nasional.

Ada terdapat perbedaan lingkungan operasional keuangan Islam, dengan apa yang berlaku di keuangan konvensional. Keuangan Islam akan menggambarkan aktivitas ekonomi riil yang menggunakan berbagai jenis transaksi seperti perdagangan dan investasi serta jasa-jasa keuangan. Terlihat bahwa dalam *dual economic System* , keuangan Islam menjadi penguat aktivitas sektor riil yang menyeimbangi sektor moneter. Sedang sektor social ekonomi yang di aplikasikan melalui Zakat, Infak, Shadaqah, dan Waqaf akan semakin menjadi penguat struktur perekonomian riil. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa bentuk instrument moneter Islam berisi berbagai kebijakan-kebijakan yang akan memperlancar arus uang ke sektor riil atau dengan kata lain akan menekan uang beredar yang menganggur untuk masuk ke sektor riil.

Namun perlu disadari juga bahwa penerapan dual economic system dalam sistem keuangan dapat saja terjadi fenomena dilematis atau trade off antara keuangan Islam dan keuangan konvensional terutama ketika porsi keuangan Islam masih sedikit. Sebagai contoh adalah ketika bank central menaikkan suku bunga diatas tingkat bagi hasil di perbankan syariah. Hal ini akan membuat kontraksi

yang cukup berarti di sisi penghimpunan bank syariah jika para nasabah masih sensitive terhadap kenaikan tingkat suku bunga.⁶⁸

Terkait dengan usaha perdagangan yang di bahas dalam penelitian ini ada Teori Penetapan Harga dalam Hukum Islam, menurut Ibn Taimiyah “ jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (al wajh al ma’ruf) bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (irtafa’a al-sa’r) karena pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya jumlah penduduk, demand)itu semua karena Allah SWT. “Dalam hal ini, memaksa penjualan untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikrah bi ghairi haqqin).

Adapun penetapan harga dibawah ini harga pasar, menurut Imam Malik barang siapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah dia diusir, karenanya, jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga dibawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.⁶⁹

Sedangkan dalam teori mekanisme pasar Islami, ada beberapa pemikiran dari para pakar Islam tentang teori tersebut, mereka membuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran serta akibatnya terhadap tingkat harga. Menurut Abu Yusuf, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal

⁶⁸Lihat, Wikipedia, sektor riil dan moneter, <http://gustani.blogspot.co.id/2012/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html>, diakses tanggal 27 maret.

⁶⁹Lihat, Mustafa kamal, op.cit, H.52-53.

tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah”.⁷⁰

Pendapat Abu Yusuf di atas seakan membantah dari hubungan negatif antara penawaran dengan tingkat harga sebab pada penawaran saja. Namun juga yang sangat penting adalah kekuatan permintaan dari pembeli. Dan demikian, kenaikan atau penurunan tingkat harga barang tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan atau penurunan produksi. Kemungkinan lain kenaikan harga dilingkungan pedagang masyarakat Indonesia karena ada rencana signifikan kenaikan harga BBM yang menyebabkan perilaku masyarakat pedagang melakukan penumpukan dan menyembunyian barang-barang dagangnya baik sebagian maupun kesemuanya.⁷¹

Mengenai pengaturan tingkat harga tersebut oleh Ibnu uhan Taimiyah mengatur tingkat harga bersifat lebih menyeluruh dibandingkan sebagian harga yang lainnya, hal tersebut ia mendukung penetapan harga dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya telah naik akibat dimanipulasi selanjutnya ia menyarankan adanya suatu penyediaan industri – industri oleh pemerintah/Negara turut serta memperbaiki tingkat pengupahan jika hal tersebut tidak terjadi secara memuaskan (persaingan bebas) oleh kekuatan-kekuatan pasar.

Sedangkan Imam Al-Ghazali sependapat dengan Ibnu Taimiyah, yang menganggap bahwa industri-industri dan jasa-jasa yang berbeda merupakan kewajiban kolektif (fardu kifayah) bagi semua muslim dengan implikasi jika

⁷⁰ Lihat, Deliarnov, op, cit, H 141.

⁷¹ Yang dimaksud penumpukan disini adalah penimbunan barang sebelum kenaikan harga.

ketersediaan industri dan jasa tersebut tidak mencukupi maka kewajiban Negara sebagai representatif dari semua untuk mengurusnya. Hal ini menggambarkan bahwa kantor industri dan perdagangan adalah kewajiban bersama untuk mengawasinya. Terkait dengan hal tersebut Al-Ghazali mengatakan apabila industri-industri dan perdagangan – perdagangan tersebut ditinggalkan begitu saja, perekonomian akan runtuh dan manusia akan lenyap.⁷²

Dari uraian di atas, peneliti mencoba menghubungkan “tingkat pendapatan UKM terhadap sektor riil” dihubungkan dengan kebijakan peningkatan kinerja sektor riil terhadap pembangunan daerah, dimana sebagai usaha dalam meningkatkan kinerja sektor riil diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat guna mendukung pembangunan daerah. Kebijakan yang dimaksud mencakup kebijakan suprastruktur dalam bentuk akomodasi pembangunan yang termaktub di dalam peraturan perundangan-undangan dan kebijakan infrastruktur yang menjadi penguat kinerja sektor riil dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan dan memperkuat sektor riil, salah satu kebijakan yang perlu digelontorkan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena sektor riil ini merupakan inti dari Negara domestik. Apapun kebijakannya, jangan mengorbankan UKM karena UKM-lah yang paling banyak menyerap tenaga kerjanya. Kalau banyak UKM ambruk, maka banyak orang yang menganggur yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

⁷² Lihat, Al-Ghazali, *Ihya'ulum al-din*, (Beirut: Dar al-Nadwah, tt) juz, h.106.

Mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini, Indonesia sebetulnya memiliki peraturan berupa instruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hanya belum di implementasikan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, inpres tersebut harus benar-benar diimplementasikan sehingga bisa menstimulus sektor riil. Dalam konteks implementasi inpres No.6/2007. Pemerintah berupaya mempertahankan target ekspor sebesar 13-14 persen, meski krisis global sedang menghadang.⁷³

Selain hal di atas, kiranya perlu sinergitas kinerja sektor riil terhadap pembangunan daerah, sektor riil merupakan aktivitas pertama dalam pembangunan, baik skala nasional maupun regional terlebih untuk membangun daerah konteks otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan inisiatif dari masyarakat daerahnya sendiri. Langkah ini merupakan upaya bagi penciptaan kemandirian regional dan dalam usaha mencapai kesejahteraan bagi rakyat indonesia keseluruhan.

Selain itu , ativitas sektor riil bahkan dalam banyak hal menjadi tolak ukur bagi dinamika pembangunan daerah.Di dalam terdapat upaya untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan didaerah, menyediakan fasilitas-fasilitas publik guna menunjang kehidupan masyarakat, menyediakan berbagai bentuk sarana dan prasarana.yang memudahkan masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini juga berarti mengindikasikan bahwa sektor riil

⁷³ Lihat, Agung Nusantara,implementasi inpres no 6/2007, Jakarta , hal. 43.

memberi dampak terhadap pertumbuhan daerah di palangka raya yang menjadi dasar bagi pembangunan daerah secara keseluruhan konektivitas antara kinerja sektor riil dengan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah seperti dengan menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun, ketersediaan infrastruktur masih perlu untuk terus ditingkatkan agar banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.⁷⁴

Sinergitas kinerja sektor riil untuk pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Agar ke depannya tidak terjadi ketimpangan yang signifikan yang pada akhirnya akan memberi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Lebih jauh, sinergitas ini perlu dibangun agar daerah mampu melaksanakan berbagai amanah yang dibebankan sebagai manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sebab jika tidak, dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut belum layak untuk menjadi daerah yang otonom.

Demikian bahasan dan analisis penelitian skripsi tentang tingkat pendapatan UKM terhadap sektor riil di Palangka Raya, semoga pemerintah kota

⁷⁴ Lihat, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, <http://ml.scribd.com/doc/141351151/bab-33-20091007094529-2158-34>, diakses tanggal 27 maret 2016

palangka raya lebih memperhatikan para UKM yang selama ini telah menjadi binaan dinas disperindag agar kedepannya mereka dapat mengembangkan sektor usahanya untuk kesejahteraan ekonomi pribadi mereka dan juga perekonomian pemerintah palangka raya pada khususnya serta perekonomian indonesia pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang tingkat pendapatan usaha kecil dan menengah Usaha Kecil Menengah terhadap sektor riil dikota Palangka Raya, disimpulkan yaitu:

1. Jenis usaha dan hasil per-hari sebagai berikut SN ; usaha Ikan presto (hasil per-hari Rp. 300.000,-), KSJR; Toko Obat (hasil per-hari Rp. 200.000,-), NAS ; usaha Jamur Tiram Putih (hasil per-hari Rp. 250.000,-), HC ; usaha Fotocopy (hasil per-hari Rp. 400.000,-), TS; Usaha Kerupuk kentang (hasil per-hari Rp. 2.400.000,-), SJO; usaha Jasa Bangunan (hasil per-hari Rp. 400.000,-), HGS ; usaha Batu Akik (hasil per-hari, tidak menentu), IRM ; usaha bengkel motor (hasil per-hari Rp. 400.000,-). Modal usaha sendiri yang di putar guling UKM di Kota Palangka Raya sebagai berikut : SN Rp. 15.000.000,-, KSJR Rp 75.000.000,-, NAS Rp. 15.000.000,-, HC Rp. 40.000.000,-, TS Rp. 40.000.000,-, SJO Rp. 45.000.000,-, HGS Rp. 10.000.000,-, AMH Rp. 40.000.000,-, ATN Rp.20.000.000,- dan IRM Rp. 15.000.000,-. Jika dilihat dari fakta usaha, hasil yang di dapat dan modal usaha yang dimiliki oleh UKM yang di teliti di Kota Palangka Raya, pada dasarnya tingkat pendapatan usaha mereka terhadap sektor riil belum memenuhi kriteria, karena di bawah standar asset dan omzet yang di tetapkan oleh oleh perindag yakni usaha mikro maks- Asset 50 juta dan omzet 300 juta, usaha kecil maks- Asset > 50 juta sampai dengan 500 juta

dan omzet > 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, usaha menengah asset > 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

B. Saran

1. Disaran agar pemerintah kota Palangka Raya lebih memperhatikan para UKM yang selama ini telah menjadi binaan Disperindag agar kedepannya mereka dapat mengembangkan sektor usahanya untuk kesejahteraan ekonomi pribadi mereka dan juga perekonomian pemerintah Palangka Raya pada khususnya serta Indonesia pada umumnya.
2. Kepada para UMK agar memanfaatkan bantuan dari pemerintah serta mengajukan gagasan atau ide yang dapat membuka pola pikir pemerintah daerah dalam membantu dan mengembangkan usaha kecil menengah agar memenuhi kriteria kesejahteraan sebagaimana yang ditentukan dalam standar UMKM.
3. Untuk pengembangan UKM kedepannya diharapkan perlu ada perbaikan dalam pengelolaan mereka. Perbaikan tersebut meliputi.
 - Modal bantuan jika memungkinkan ditingkatkan/ditambah jumlahnya agar mampu bersaing dengan pengusaha dengan modal besar.
 - Perlu ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM para pelaku UKM sehingga mereka lebih kreatif dan termotivasi untuk menjalankan usaha mereka.

- Perlu ada pendamping atau konsultan usaha bagi para pelaku UKM agar mereka mampu memiliki jenis usaha yang prospektif dan berpotensi besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nusantara, Agung. 2009. *Selamat Sektor Riil Indonesia*, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Februari 2009.
- Al-Ghazali, Ihnya'ulum al-din, (Beirut: Dar al-Nadwah, tt) juz, h. 106.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Kota Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Prasetyo, Eko. *Peran Usaha Mikro dan Menengah Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*.
- Maulida, Helwiyani. *Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Skripsi Jurusan Syariah IAIN Palangka Raya.
- WS, Indrawan. 2013. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Noviyana Wati, Lisa. *Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro*. Skripsi Jurusan Syariah IAIN Palangka Raya
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Mardalis. 2004. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim,.2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

B. Internet

Adi Barahma. 2016. *Sektor Riil. Perekonomian Indonesia*. Diakses 14 Maret 2016.

Anwar Triwibowo. *Sektor Riil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah* diakses tanggal 25 Maret 2016.

<http://liliesmiati2122.blogspot.co.id/2015/09/Makalah-sektor-moneter-penopang-sektor.html>. Diakses 15 Maret '2016

Thoha muhammad. [Blogspot.co.id/ 2014 / 08 / keseimbangan-sektor-riil-dan-moneter.html](http://Blogspot.co.id/2014/08/keseimbangan-sektor-riil-dan-moneter.html), diakses 15. Maret 2016.

Wikipedia, sektor Riil dan Moneter, [http://gustani.blogspot.co.id/ 2012 / 10/ hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html](http://gustani.blogspot.co.id/2012/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html). diakses tanggal 27 Maret 2016

[http://restafebri.blogspot.com/ 2009 / 03 / pengertian-dan-kriteria-usulan-mikro-08.html](http://restafebri.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usulan-mikro-08.html). diakses 16 Maret 2016.